

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**





PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (B A P P E D A) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

Visit Our Website :

<https://bappedabanggaikab.site/home>

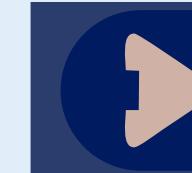




DAFTAR ISI

 Sambutan Kepala Bappeda Kab. Banggai

 Sejarah Bappeda Kab. Banggai

 Kepala Bappeda Kab. Banggai Kurun Waktu
1980 - 2024

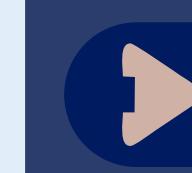
 Susunan Organisasi Bappeda Kab. Banggai

 Struktur Organisasi

 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kab. Banggai

 Penjabaran Visi Misi Kab. Banggai 2021-2026

 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kab. Banggai

 Penjenjangan Kinerja, Crosscutting Program Kegiatan & Cascading Kinerja Bappeda Kab. Banggai

 Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kab. Banggai

 Penghargaan yang diraih

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaan Nya, Buku Profil Bappeda Kabupaten Banggai Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Buku profil ini berisi beberapa informasi singkat tentang Bappeda Kabupaten Banggai serta gambaran capaian kinerja Bappeda Kabupaten Banggai setahun terakhir . Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyedian data dan informasi yang diperlukan, masukan dan kritik saran yang membangun sangat kami perlukan guna penyempunaan Buku Profil selanjutnya.

Demikian, semoga Buku Profil Bappeda Kabupaten Banggai dapat memberikan manfaat.

Terima Kasih.....

SEJARAH BAPPEDA KAB. BANGGAI

- Bappeda Kabupaten Banggai dibentuk pertama kali Tahun 1980 dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai serta Peraturan Bupati Banggai No 31 tahun 2017 tentang uraian tugas fungsi tata kerja badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan daerah kabupaten banggai sejak saat itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai (BAPPEDA) berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai (BAPPEDALITBANG).
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai serta Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah. sejak saat itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Banggai menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai.



KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI KURUN WAKTU 1980-2024



DRS. H. ABD. MADJID MANG
1980-1985



DRS. H. DJARUN SIBAY
1985-1991



DRS. SALEH AKUM
1991-2000



DRS. H. SYAHRAIN SUNI, MM
2000-2004

KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI KURUN WAKTU 1980-2024



H. MUSDAR M. AMIN, SE, M.SI
2004-2006



PLT. DRS. YUTEN KOLEBA
2006-2007



IR. H. FAIZAL MANG, MM
2007-2010



PLT. DRS. HAMZAH UNOK
2010-2011

KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI KURUN WAKTU 1980-2024



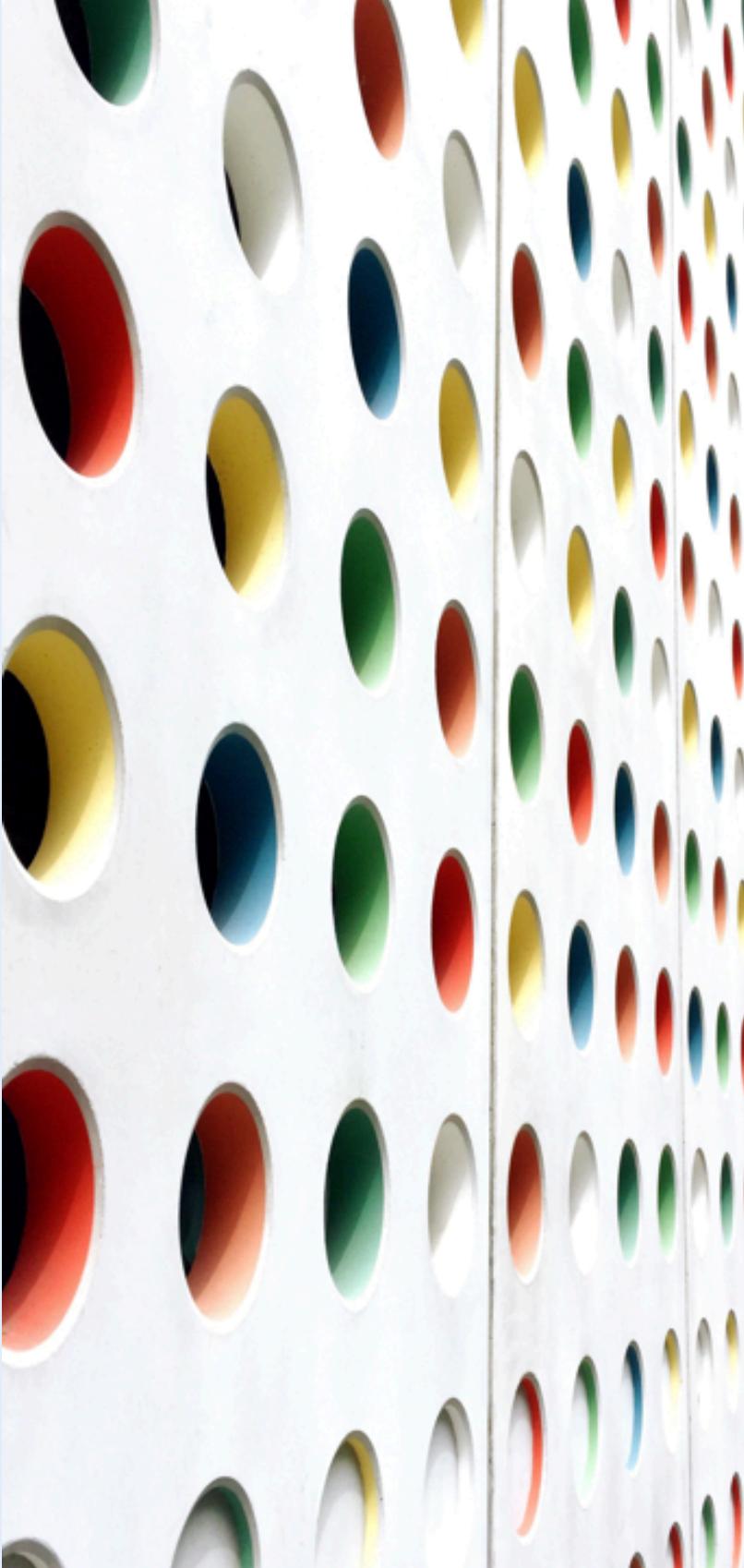
HASANUDDIN IDRIS, SH, S. KOM
2011-2012



IR. ANDI DJALALUDDIN, MM
2012-2015



IR. MOH. RAMLI TONGKO, S.SOS, ST, M.SI
2015-SEKARANG



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. **Kepala Badan**
2. **Sekretariat, membawahi :**
 - a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
 - b. **Kelompok Jabatan**
3. **Bidang Perencanaan Umum, Pengendalian dan Evaluasi**
4. **Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya**
5. **Bidang Perencanaan Ekonomi**
6. **Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat**
7. **Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**
8. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BADAI

SEKRETARIS BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN UMUM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATA FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNA MANUSIA DAN MASYARAKAT

KELOMPOK JABAT FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAH DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPT

PERSONIL BAPPEDA

NAMA	JABATAN
Ir. MOH. RAMLI TONGKO, S,SOS, ST, M.SI	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI
ABDULLAH DJAAFAR, S.SOS., ME	SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT	
IRAWATI T LAHEBA, S.Sos	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Dra. NELLY OCTOVIN MALUEGHA	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
YUNIWER Y SORISI, SH	PERENCANA AHLI MUDA
FITRIANTI MASIR, S.Sos	STAF PELAKSANA
FACHNUN, SE	STAF PELAKSANA
RAHMATIA, SM	STAF PELAKSANA
EDWIN ONGIN AMAR SAKTI P. S.Kom	STAF PELAKSANA
INDARI H.M, SE	STAF PELAKSANA

PERSONIL BAPPEDA

NAMA	JABATAN
LISA LARASATI LANUSI, SH	STAF PELAKSANA
INGRID JUNISAR AGAMA, S.Pd., M.AK	STAF PELAKSANA
FAJRIANSAH DANIA, S.IP	STAF PELAKSANA
SAHBUDIN WADJIB	STAF PELAKSANA
FAHRI SIDJONG	STAF PELAKSANA
RIZALDY	STAF PELAKSANA
IVANA DEWI ABUSAMA, SE	STAF PELAKSANA
RANSE HATIBIE, S.IP	STAF PELAKSANA
NILUH NIA LISTIANI, S.AK	STAF PELAKSANA
SUSANA MILANG, SH	STAF PELAKSANA
FAHRI LAMALA, S.SOS	STAF PELAKSANA
AJIBON LASAHA, S.IP	STAF PELAKSANA
RAFLI MONOARFA	STAF PELAKSANA

PERSONIL BAPPEDA

NAMA	JABATAN
BIDANG PERENCANAAN UMUM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	
SRI DESIYANI BENDA, SE	KABID PERENCANAAN UMUM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
FADLY AMIR, SE	PERENCANA AHLI MUDA
RATNA JUITA DG, MATORANG, ST, M.AP	STAF PELAKSANA
FADHLUN AR. AGAMA, S.Sos, M.Si	STAF PELAKSANA
RENDY ALRYANDI SOFYAN, ST	STAF PELAKSANA
IRVAN AGUSTYAWAN, SM	STAF PELAKSANA
IRKAWATI DUNGGA, SE	STAF PELAKSANA
IDA AKMALIA, S.I.Kom., M.A	STAF PELAKSANA
DIRGA RISALDI LANUSI, ST	STAF PELAKSANA
SANDRA PRABOWO, A.Md.	STAF PELAKSANA
BIDANG PERENCANAAN EKONOMI	
HARTINI DJAAFAR, S.Sos	KAPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI
SRI MURNIATI ISMAIL, SE	PERENCANA AHLI MUDA
ALIANA, SE., M.Ak	STAF PELAKSANA

PERSONIL BAPPEDA

NAMA	JABATAN
SUMITRO BATJO, SE,MM	STAF PELAKSANA
STEPANUS ARRUNG R, SE	STAF PELAKSANA
NERLIS ANDRIANA DEVI, SH	STAF PELAKSANA
SILFIA RAHMAN, SH	STAF PELAKSANA
JEINE CLAUDIA LAMBANI, S.Kom	STAF PELAKSANA
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
NANIN HENDARTI LASADAM, S.Kom	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
MOHAMMAD ROOM, S.S, M.SI	PERENCANA AHLI MUDA
ISMAWATI NUR, S.IP	STAF PELAKSANA
MEYDY, SKM	STAF PELAKSANA
SURTIKANTI DJAMALI	STAF PELAKSANA
ARDIYANTO LABUAN, SH	STAF PELAKSANA
MASRA MASAMBA	STAF PELAKSANA
YESSY WISYE LINGGI	STAF PELAKSANA
ASY'ARY R KALATU'E	STAF PELAKSANA

PERSONIL BAPPEDA

NAMA	JABATAN
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	
SYAHBUDIN DAYANUN, ST., M.ENG	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
ABD. HALIM LASADAM, <u>S.Sos</u>	PERENCANA AHLI MUDA
STEMIN HAMZAH, ST	STAF PELAKSANA
IKHSAN TOBIGO, SE	STAF PELAKSANA
JUNICHE IRENE SARAPANG, <u>S.Kom</u>	STAF PELAKSANA
MUSMULIADI UNOK, <u>S.Sos</u>	STAF PELAKSANA
DELVI ROSANTI PADJA, SH	STAF PELAKSANA
ANTARINI NURMAN, SE	STAF PELAKSANA
MADA REGINA IRFITANIA SALAWALI, ST	STAF PELAKSANA

NAMA	JABATAN
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT	
SUPRIADI SAHADA, ST	KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
KURNIAWATI SAIDA, SE.,ME	PERENCANA AHLI MUDA
LUTHFI RACHMA, S.Psi	PERENCANA AHLI MUDA
FITRIA Hi. ABBAS KARIM, SE	STAF PELAKSANA
AHYAR, SM	STAF PELAKSANA
MOHAMAD ZUKRI AT. ARSAD, S.Pd.I	STAF PELAKSANA
PATMAWATI SYAMSUL, SH	STAF PELAKSANA
INGRID PONGLABA, SE	STAF PELAKSANA

Kondisi Kepegawaian BAPPEDA

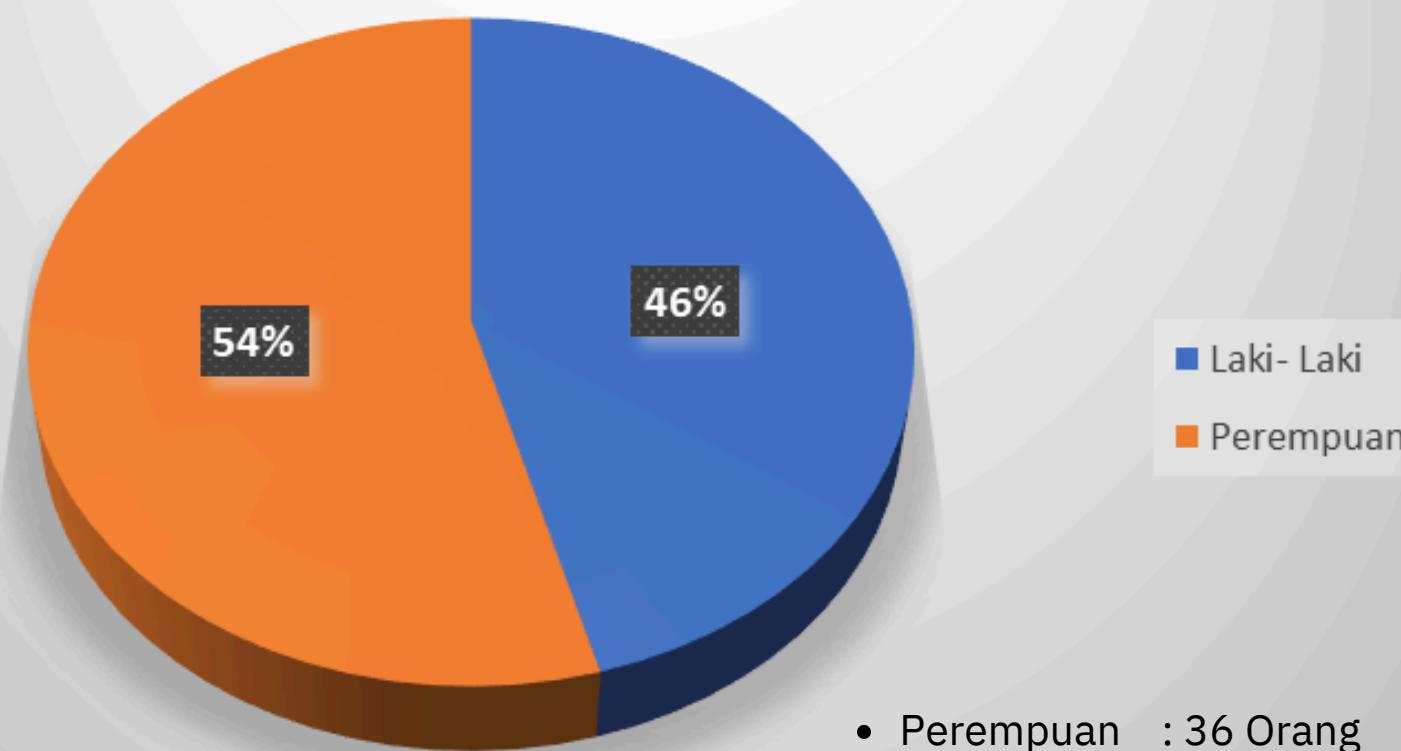


KONDISI KEPEGAWAIAN BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

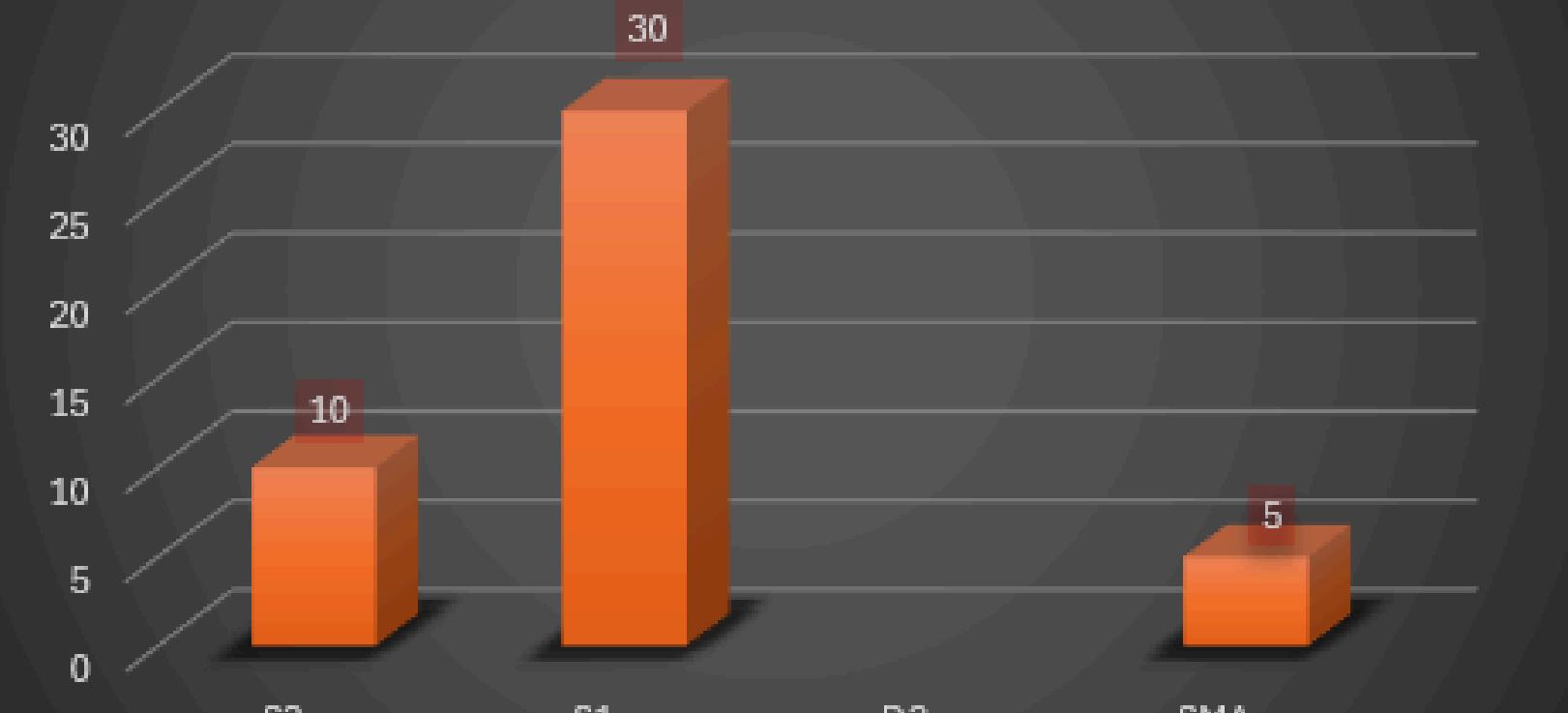
PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2024

- Pegawai Definitif : 45 Orang
- Honorer : 23 Orang

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS



PENJABARAN VISI MISI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2026

Bappeda Kabupaten Banggai merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Bappeda mendukung Misi 6 Kabupaten Banggai yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan tujuan: Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan serta Inovasi Daerah dengan Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Keselarasan Dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Nasional, Propinsi Dan Perangkat Daerah Sehingga Berorientasi Hasil Dan Mempercepat Kemajuan Daerah
2. Meningkatnya Inovasi Dan Hasil Kelitbangsaan Yang Mendukung Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Tata Kelola Bapedia Yang Inovatif, Bersih, Transparan Dan Akuntable



TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL



**TUJUAN BAPPEDA: PENINGKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
SELARAS, BERORIENTASI HASIL DAN
MEMPERCEPAT KEMAJUAN DAERAH**

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KAB. BANGGAI

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANGGAI YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL				
MISI 6 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE				
I.	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan daerah	1. Meningkatnya Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi dan Perangkat Daerah sehingga berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi peyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang inovatif, selaras, konsisten dan berorientasi hasil • Mengoptimalkan sistem informasi dan data perencanaan • Memastikan terlaksananya rencana pembangunan daerah secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan. 	1. Menjaga keselarasan dan konsistensi dokumen RPJPD/ RPJMD/ RKPD dengan RPJPN/RPJMN/RKP dan Dokren Propinsi. 2. Menjaga Keselarasan dan Konsistensi RPJMD/RKPD dengan Renstra dan Renja PD. 3. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) serta PENTAHelix dalam penyusunan dokren. 4. Melaksanakan penugasan mandatori Bappedalitbang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
				1. Meningkatkan koordinasi dan penggunaan satu data Banggai dalam proses perencanaan pembangunan daerah, untuk keseragaman data. 2. Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
				1. Optimalisasi Sistem Informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah 2. Pengendalian dan evaluasi pencapaian target pembangunan daerah, secara terukur, konsisten dan berkesinambungan.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KAB. BANGGAI

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Tata Kelola Bappeda yang Inovatif, Bersih, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kinerja Bappeda sebagai Lembaga perencana pembangunan daerah yang berkualitas dan kredibel.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.2. Meningkatkan pengelolaan SDM, Tata Laksana dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan Tupoksi.3. Meningkatkan pelayanan4. pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.



*Penjenjangan Kinerja, Crosscutting Program
Kegiatan & Cascading Kinerja*

BAPPEDA

PENJENJANGAN KINERJA BAPPEDA

- Penjenjangan Kinerja (Pohon dan Cascading Kinerja) akan menentukan benar tidak nya Perencanaan dan Pengukuran kinerja sebagai komponen penilaian SAKIP.
- Oleh karena itu perbaikan penjenjangan kinerja akan memperbaiki keseluruhan komponen SAKIP, Termasuk pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

RENSTRA BAPPENAS 2020 – 2024, TUJUAN :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan Sasaran Strategis
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

RENSTRA balitbangdagri 2020 – 2024, TUJUAN :

1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri
2. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder
3. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah
4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

MANDAT:

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 tahun 2023 bahwa Bappeda melaksanakan fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Isu strategis/Permasalahan:

1. Keselarasan, Konsistensi dan Ketercapaian Sasaran Rencana Pembangunan daerah belum Optimal.
2. Hasil Kelitbang belum di manfaatkan secara optimal.
3. Tumbuh Kembangnya Inovasi Daerah belum optimal
4. Tata Kelola Bappedalitbang yang Bersih, Transparan dan Akuntable belum optimal



Ekspektasi/Harapan Masyarakat/
Stakeholder: agar tercipta perencanaan pembangunan yang berkualitas

ULTIMATE OUTCOME BAPPEDA

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah agar berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Bappedalitbang yang bersih, Transparan dan Akuntable.



TUGAS POKOK & FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 44 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah, Kepala Bappeda mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan Pembangunan daerah meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang kesekretariatan, perencanaan umum, data, monitoring dan evaluasi, pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**DOKUMEN PERENCANAAN
MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN DOKREN**



TUGAS POKOK & FUNGSI

“
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
melaksanakan fungsi
penunjang Perencanaan
Pembangunan Daerah
”

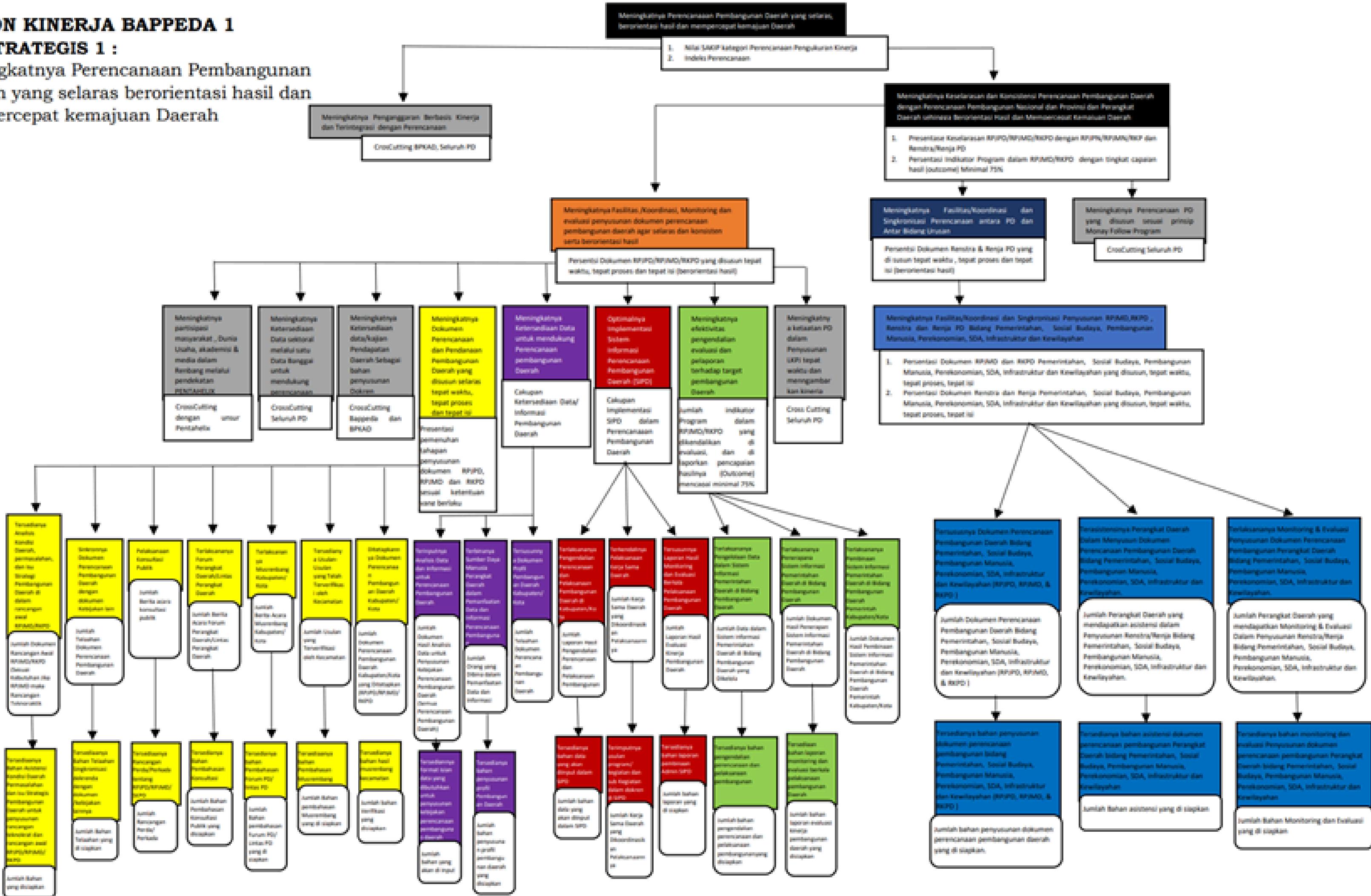
Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 44 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah, Kepala Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

POHON KINERJA BAPPEDA 1

ISU STRATEGIS 1 :

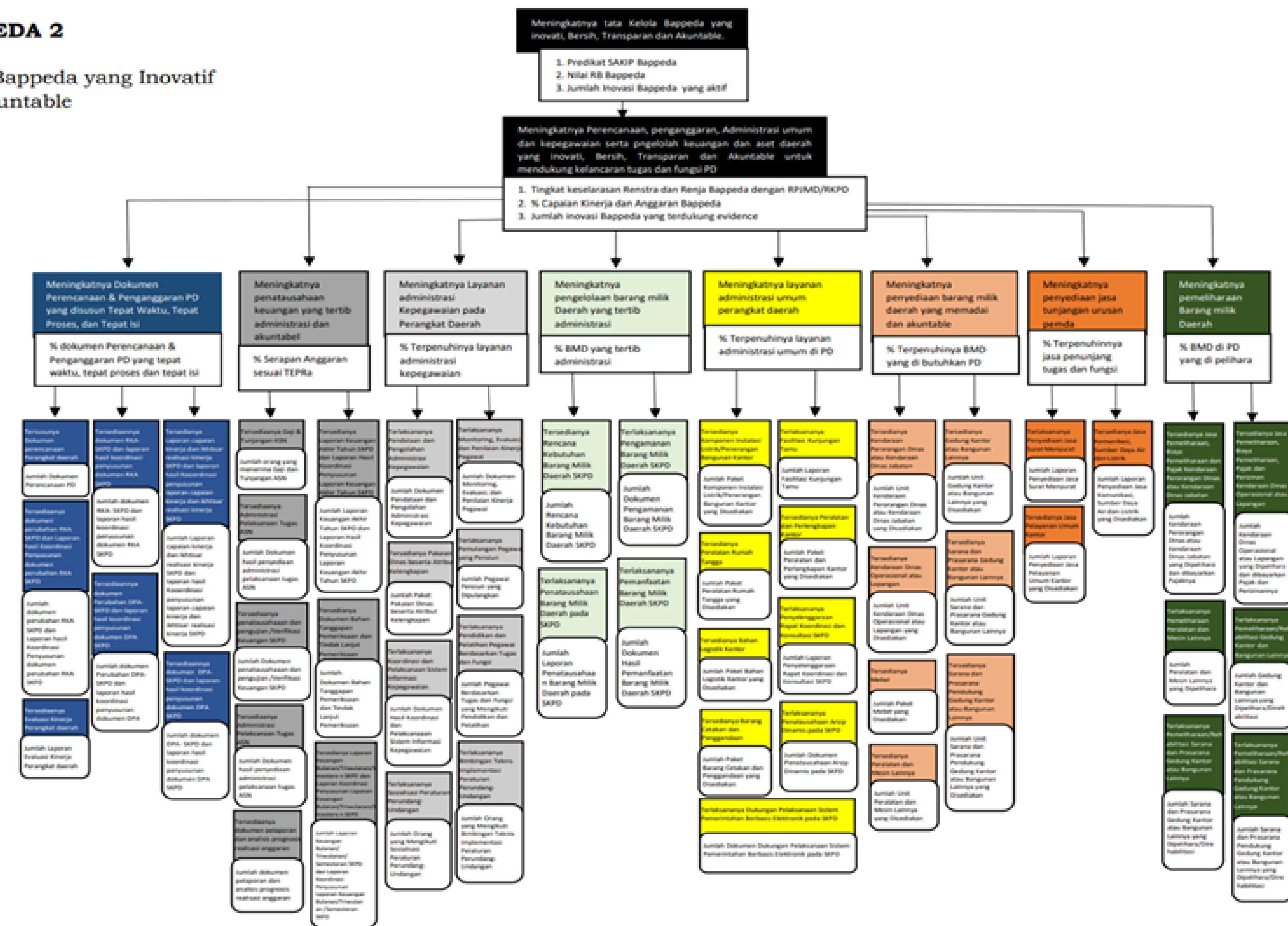
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Daerah



POHON KINERJA BAPPEDA 2

ISU STRATEGIS 1 :

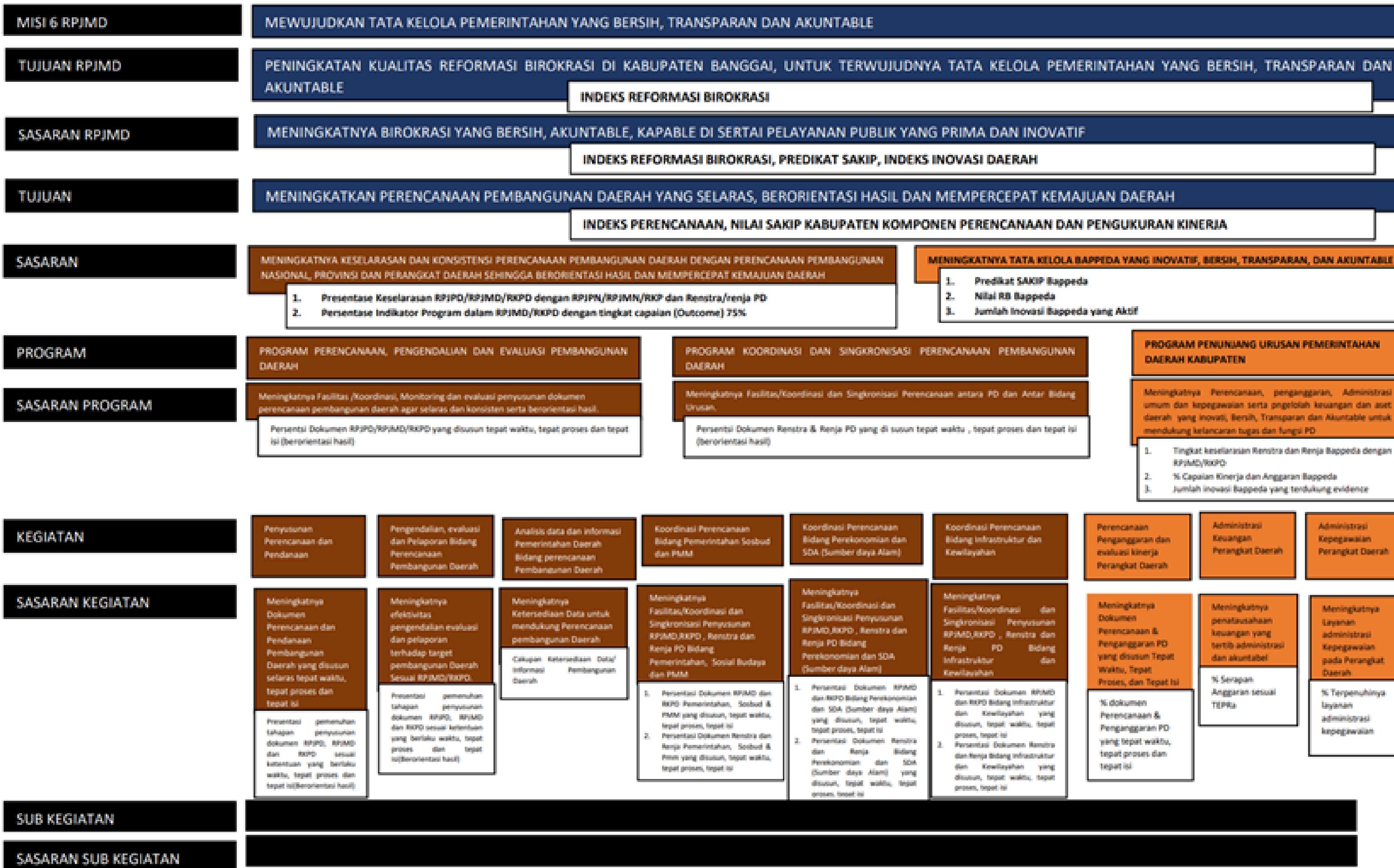
Meningkatnya Tata Kelola Bappeda yang Inovatif Bersih, Transparan dan Akuntabel



CROSSCUTTING BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI



CASCADING KINERJA BAPPEDA



PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UTAMA

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RANWAL RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA DAN RENJA PD)



PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UTAMA

KOORDINASI, ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI BIDANG MITRA



PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UTAMA

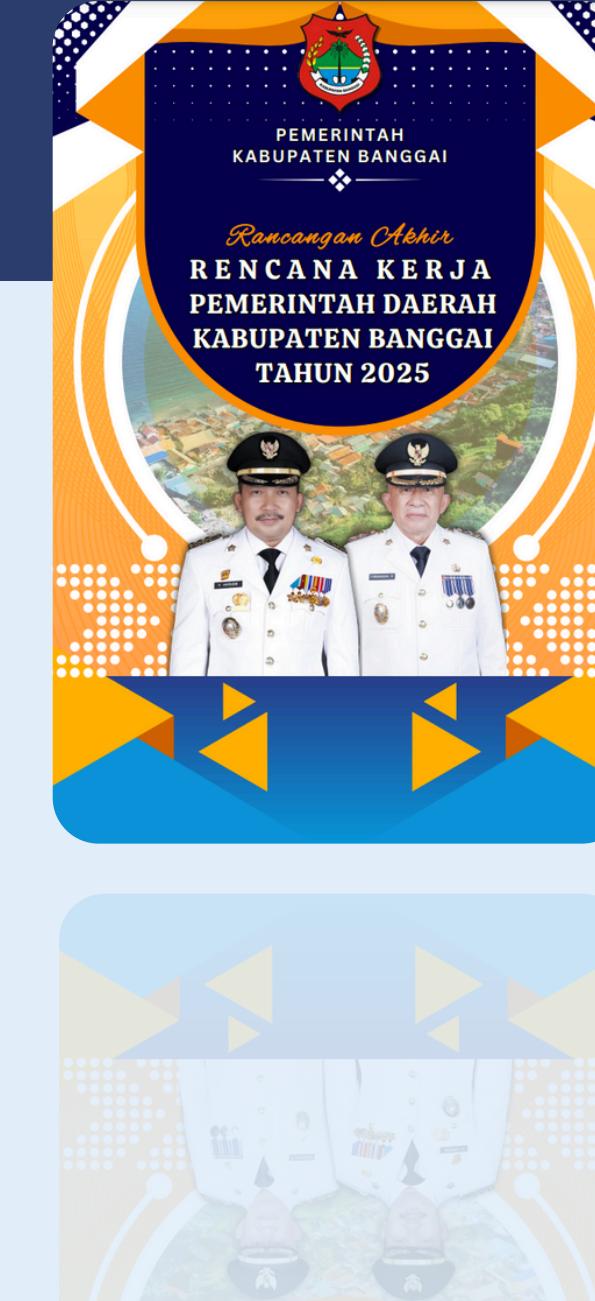
KOORDINASI, ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI BIDANG MITRA



PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RUTIN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, EVALUASI KINERJA

BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI



PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RUTIN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, EVALUASI KINERJA

BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI



*Family Gathering &
Rapat Kerja*

BAPPEDA



FAMILY GATHERING & RAPAT KERJA BAPPEDA KAB. BANGGAI



Purna Tugas dan Serah Terima jabatan BAPPEDA



MASA PURNA BAKTI HERLINA M. TUNGGUL, SH



TEMU PISAH JAFUNG PERENCANAAN





Banggai Government Expo 2024

BAPPEDA

BANGGAI GOVERNMENT EXPO 2024

Pameran Pembangunan Banggai Government Expo 2024. Yang dilaksanakan selama empat hari dan ditutup pada Sabtu 21/05/2024 oleh. Bupati banggai Ir H Amirudin bersama Wakil Bupati Drs Furqanuddin yang didampingi oleh Sekda Banggai Ramli Tongko, para Unsur Forkopimda para Forum Camat Forum Desa. Serta para tamu undangan yang hadir.

Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, yang memberikan penghormatan kepada Bupati Banggai dan seluruh jajaran pemerintahan atas terselenggaranya Banggai Expo 2024.

Sekretaris Bappeda Banggai Abdullah Djafar S.Sos., M.E. yang mewakili Kaban menyampaikan ikut nya Bappedalit dalam pameran tersebut, menampilkan berbagai program dan kebijakan inovatif yang telah dicanangkan oleh pemimpin daerah tersebut untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banggai.

Bappeda tidak hanya ikut Pameran akan tetapi juga mengikuti Vocal Group tingkat OPD yang di laksanakan pihak panitia pameran. Guna mengasah tingkat keberanian dan meramaikan acara tersebut.

Dalam Pameran Banggai Government Expo 2024 memberikan gambaran nyata tentang komitmen dan kinerja Bupati Amirudin dan Wakil Bupati Furqanuddin dalam mendorong inovasi, transformasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Banggai. **Masyarakat pun terkesan dan optimis dengan arah pembangunan yang dijalankan oleh pasangan pemimpin daerah tersebut, serta semakin yakin bahwa Banggai akan terus berkembang menjadi daerah yang lebih baik,” tutup Abdullah Djafar.**

DOKUMENTASI





Bidang Perencanaan Umum,
pengendalian & Evaluasi
BAPPEDA

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI 2024

**MEMPERCEPAT
TRANSFORMASI EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN**

TEMA RKP 2024

**PERCEPATAN PENINGKATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF BERBASIS
KOMODITAS UNGGULAN
YANG DI DUKUNG SUMBER
DAYA MANUSIA YANG
BERDAYA SAING**

**TEMA RKPD
SULTENG 2024**

Kemandirian Ekonomi
Masyarakat Melalui
Pemanfaatan Potensi
Unggulan Daerah,
SDM, Serta
Transformasi Digital
Dalam Pelayanan Publik

Peningkatan
Kesejahteraan dan
perekonomian
masyarakat di
dukung penguatan
daya saing SDM dan
pelayanan publik
Prima

Perwujudan
Kemajuan,
Kemandirian dan
Kesejahteraan
Masyarakat
Kabupaten Banggai

2023

2024

2025

2026

Kemandirian
Ekonomi daerah di
dukung penguatan
daya saing SDM,
penguatan
transformasi digital
dan Kualitas
Pelayanan Publik

Peningkatan
Kemandirian dan
Daya Saing
Daerah menuju
Kesejahteraan
Masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI 2024



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI 2024





PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

8

6. KEARSIPAN

- Capaian Indeks Pengelolaan Kearsipan

7. PELAYANAN PUBLIK

- Digitalisasi Pelayanan Publik
- Pemenuhan Standar Pelayanan Publik

8. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada

9. KECAMATAN

- Pelimpahan Kewenangan di sertai anggaran Kepada Camat

1. REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP :

- Penerapan RB Tematik (Kemiskinan & Stunting)
- Peningkatan Nilai SAKIP
- Unit Kerja Zona Integritas, WBK/WBBM

2. TRANSFORMASI DIGITAL/SPBE :

- Capaian Penerapan SPBE

3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH:

- Penuntasan Dokumen RPJPD 2025 - 2045, Teknokratik RPJMD dan RKPD 2025.
- Integrasi perencanaan dan penganggaran
- Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah

4. KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN ASN:

- Evaluasi Kelembagaan Daerah
- Digitalisasi layanan kepegawaian
- Profesionalisme ASN
- Pelaksanaan Sistem Merit

5. PENGAWASAN:

- Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
- Manajemen Resiko Kabupaten dan Perangkat Daerah

PROSES PENYUSUNAN RKPD 2025 BOTTOM UP & TOP DOWN



- **DILAKSANAKAN TANGGAL 29 Januari – 1 Februari 2024 DENGAN PESERTA DI 24 KECAMATAN BERJUMLAH ± 1.500 PESERTA**
- **MUSRENBANG KECAMATAN DI LAKSANAKAN DUA TAHAP, YAITU TAHAP I UNTUK PENYEPAKATAN USULAN YANG DI AJUKAN DALAM SIPD DAN TAHAP II YANG DI HADIRI LANGSUNG BUPATI/WAKIL BUPATI BANGGAI, GUNA MENYERAP LANGSUNG ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PRIORITAS KECAMATAN.**
- **JUMLAH USULAN YANG DISEPAKATI SEJUMLAH ± 3488 USULAN**



MUSRENBANG DESA/MUSDES

- DILAKSANAKAN SEPANJANG BULAN JANUARI, DI FASILITASI OLEH KECAMATAN DAN DINAS PMD.
- HASIL MUSDES/MUSRENBANG DESA DALAM BENTUK DUA RKPDesa.
- JUMLAH USULAN YANG TERINPUT DALAM SIPD SEJUMLAH 3488 USULAN

MUSRENBANG KECAMATAN



MUSRENBANG KABUPATEN

- DILAKSANAKAN TANGGAL 14 MARET 2023 DENGAN PESERTA SELURUH PD, KECAMATAN DAN DELEGASINYA, ANGGOTA DPRD SELURUHNYA BERJUMLAH ± 300 PESERTA
- FORUM PERANGKAT DAERAH DILAKSANAKAN UNTUK MENYELARASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DENGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KECAMATAN BESERTA INDIKATOR GUNA PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RKPD KAB. BANGGAI TAHUN 2024
- DISEPAKATI SEJUMLAH 154 PROGRAM 463 KEGIATAN 1.389 SUB KEGIATAN.

DOKUMENTASI MUSRENBANG NASIONAL & MUSRENBANG PROVINSI





PENYUSUNAN

RPJPD



KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2025 - 2045



DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJPD

KABUPATEN BANGGAI 2025 - 2045

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. **PASAL 5 (1)** “RPJP MEMUAT VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA RPJP NASIONAL”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah. **PASAL 263 (2)** “RPJPD MERUPAKAN PENJABARAN DARI VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG UNTUK 20 TAHUN YANG DISUSUN BERPEDOMAN PADA RPJMN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. **PASAL 12 (1)** “RPJPD MERUPAKAN PENJABARAN DARI VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG UNTUK 20 TAHUN YANG DISUSUN BERPEDOMAN PADA RPJMN DAN RENCANA TATA RUANG”.

SIMULASI PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045

PERSIAPAN PENYUSUNAN



SIMULASI PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029



TIMELINE PENYUSUNAN TEKNOKRATIK RPJMD, KLHS RPJMD DAN RPJMD 2025-2029

2024

Pembahasan
Teknokratik RPJMD

MEI

Sosialisasi
Teknokratik RPJMD
ke Parpol

JULI

27-29 Agustus
Pendaftaran Paslon

AGUSTUS

27 November
Pilkada Serentak

NOVEMBER

**PENYUSUNAN TEKNOKRATIK
RPJMD 2025-2029 (AKHIR JULI)**

PENYUSUNAN KLHS RPJMD

PERMENDAGRI NO. 7 TH 2018
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS

Ps 26. Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan
penyusunan rancangan teknokratik RPJMD

2025

Pelantikan kepala daerah
Antara bulan Januari-Maret

JANUARI

Antara
Jan-Maret

**PELANTIKAN
KEPALA
DAERAH**

Selesai sebelum
pelantikan

Start saat
pelantikan

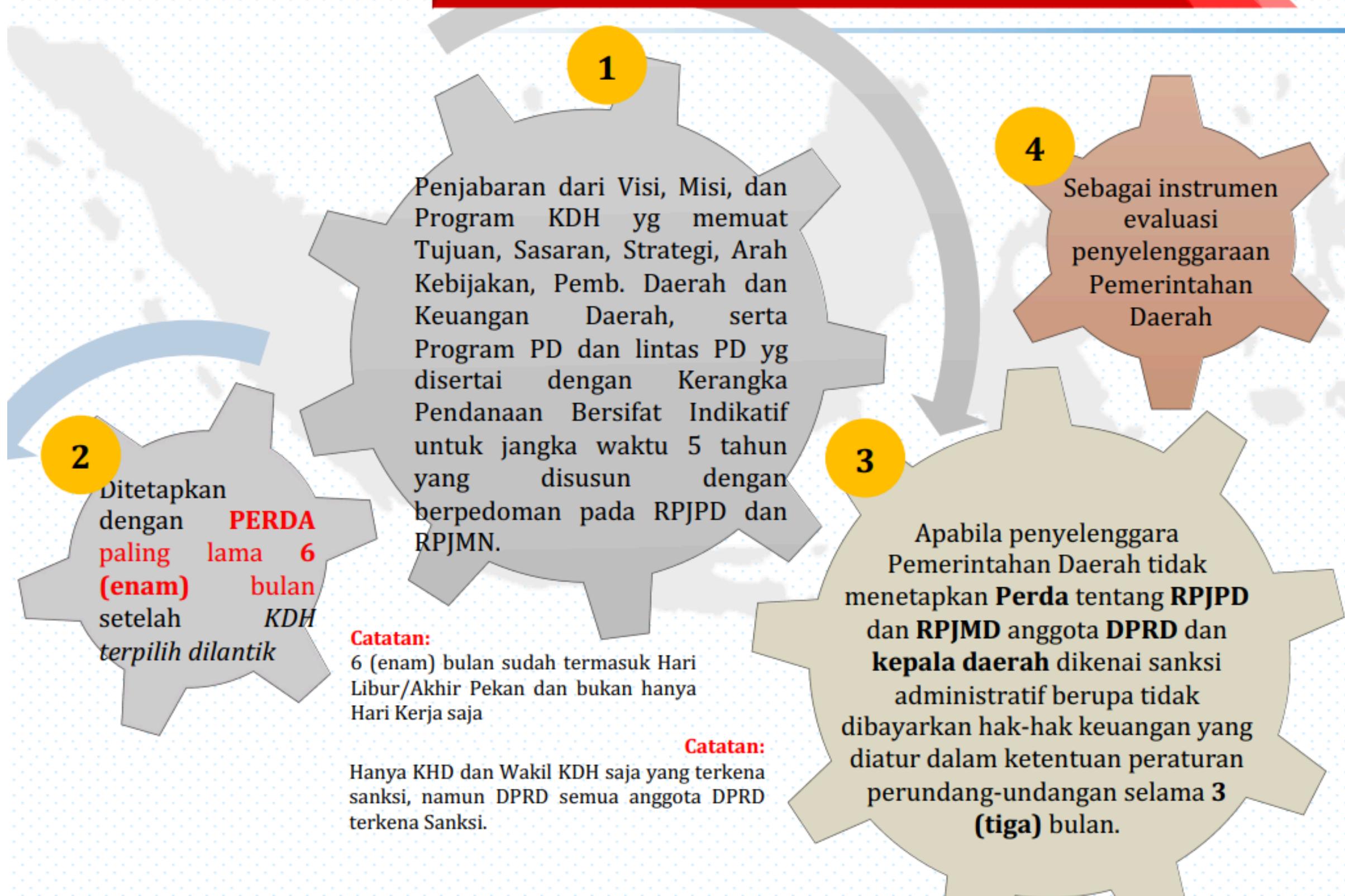
PENYUSUNAN RPJMD 2025-2029

PENETAPAN RPJMD 6 (ENAM) BULAN SETELAH PELANTIKAN KDH

SEPTMBER

**PENETAPAN
RPJMD 2025-2029**

PENGERTIAN RPJMD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

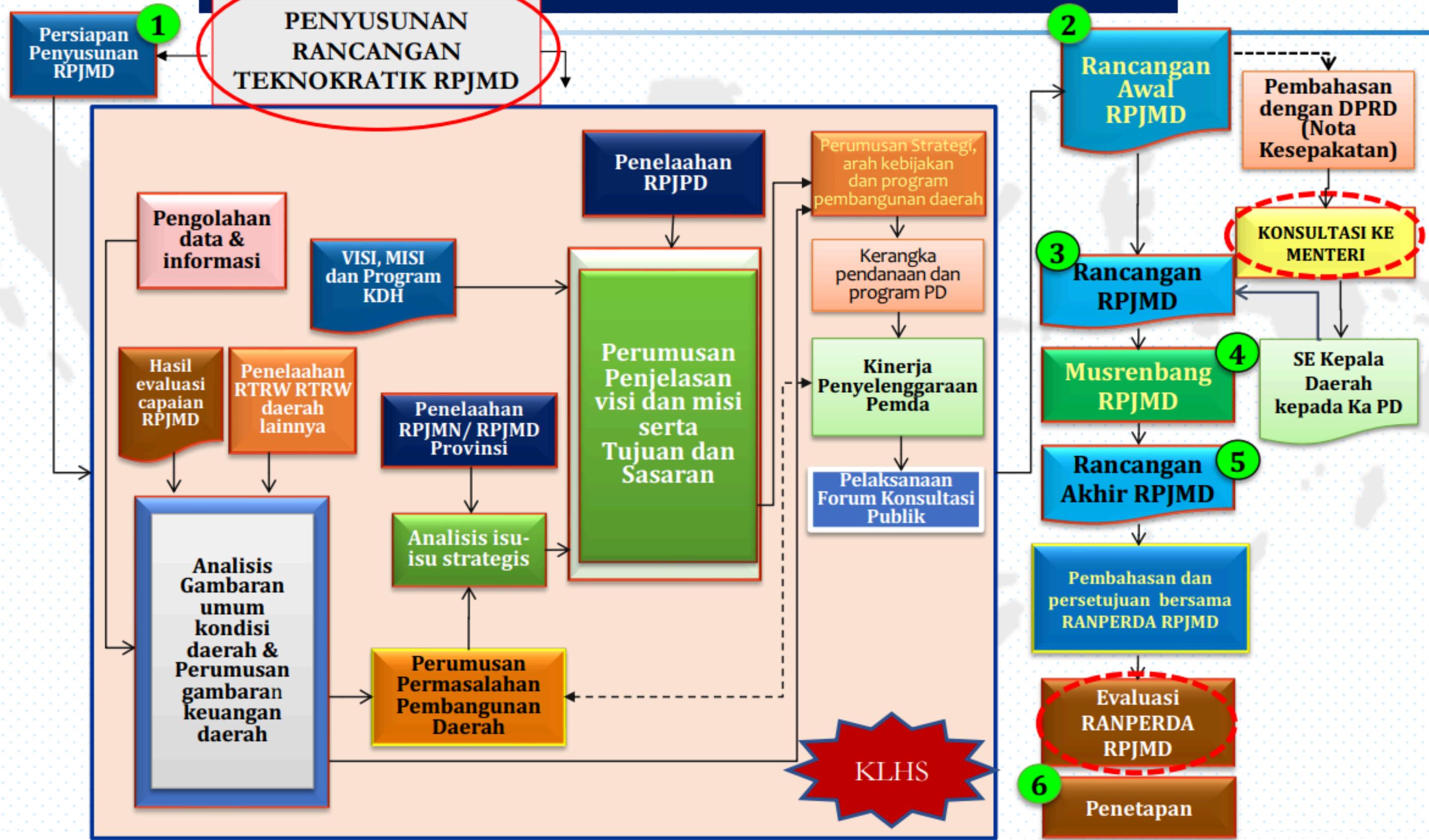


Kewajiban KDH & Wakil KDH
Melaksanakan Program Strategis Nasional
Pasal 67 Huruf F
UU No 23 Tahun 2014

Sanksi Jika Tidak Melaksanakan

1. Dikenai sanksi ADM berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gub dan/atau Wagub serta oleh Gub sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau Wabup atau wali kota dan/atau wakil Wal.
2. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH.

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD



LINGKUP PENYUSUNAN RANTEK RPJMD TAHUN 2025-2029





MUATAN RPJPD

RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH



UU NO. 23 TAHUN 2014

tentang Pemerintahan Daerah

PASAL 265

RPJPD menjadi pedoman

VISI

MISI

PROGRAM

(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Kepala Daerah



PASAL 263

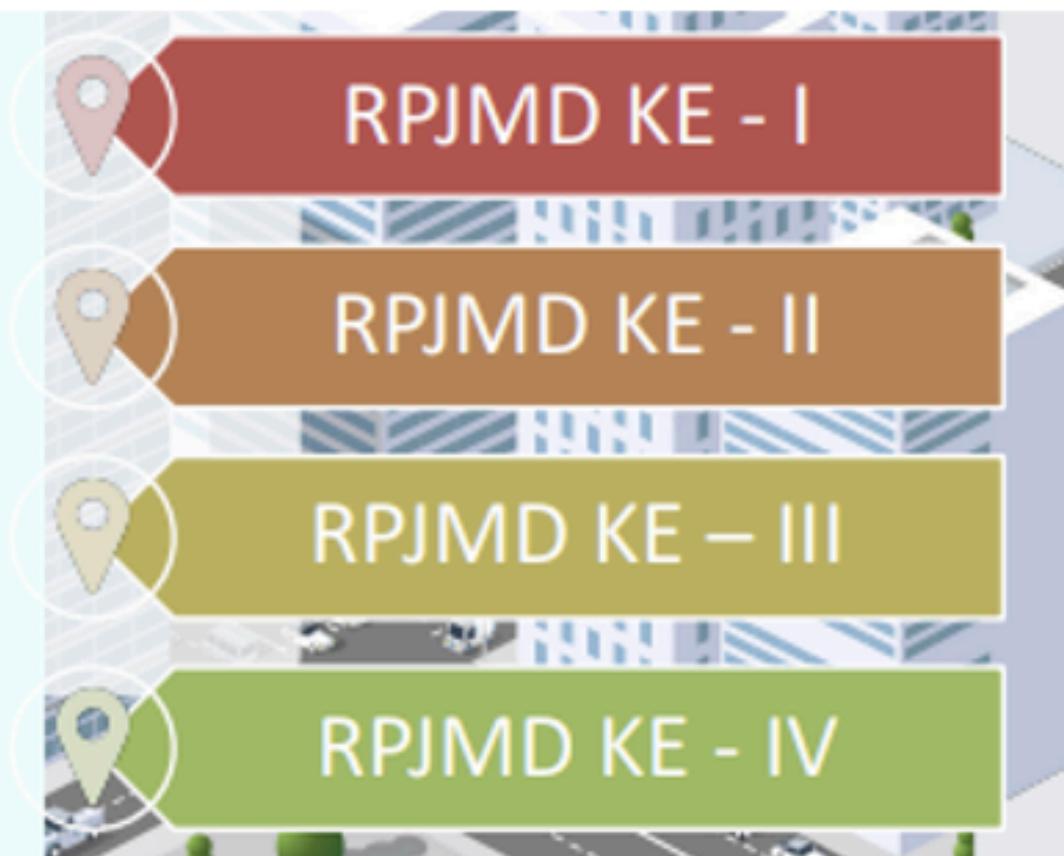
RPJPD menjabarkan:

- visi,
- misi,
- arah kebijakan, dan
- sasaran pokok

Pasal 265

CALON KI

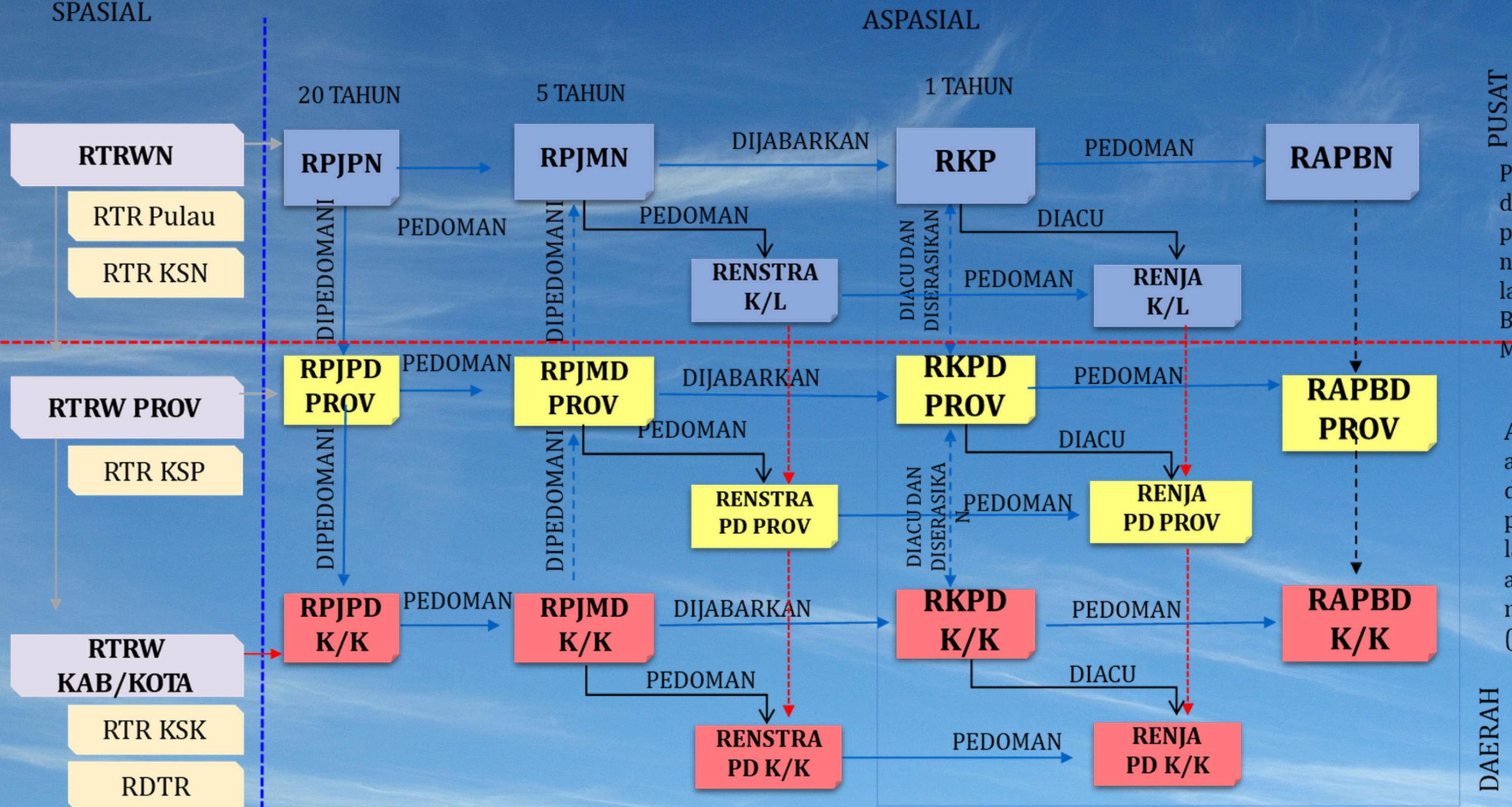
(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.



20
TAHUN

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SPASIAL



DAERAH

1. Sinkronisasi
Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.

2. Konsistensi
Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).

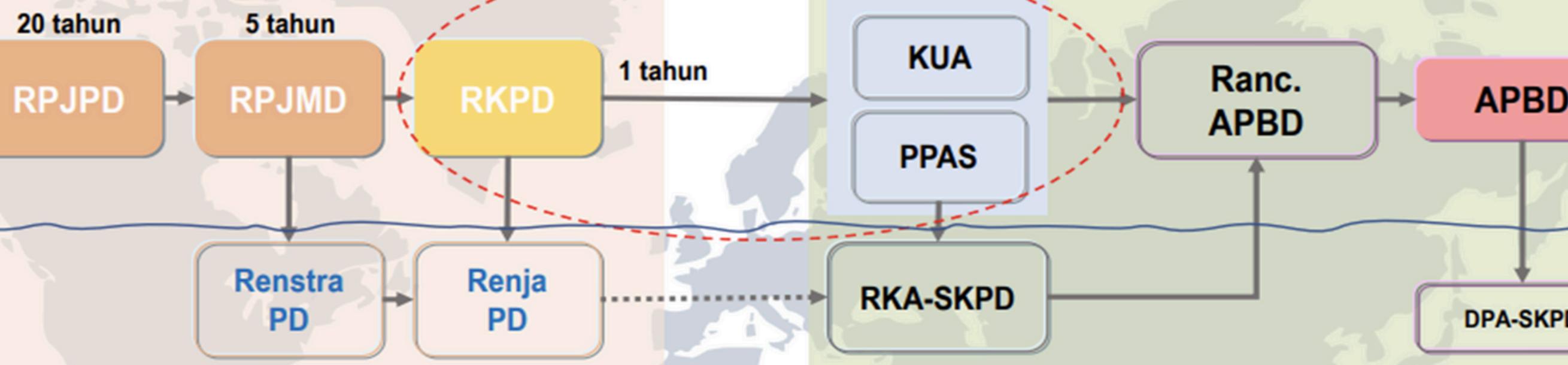
TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

INTEGRASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN

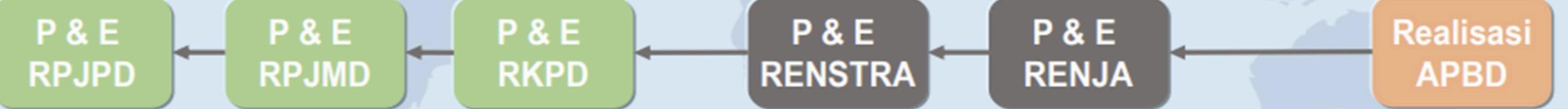
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap Penganggaran Daerah

REVIU
APIP



Tahap Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



“Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya”

KETERHUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

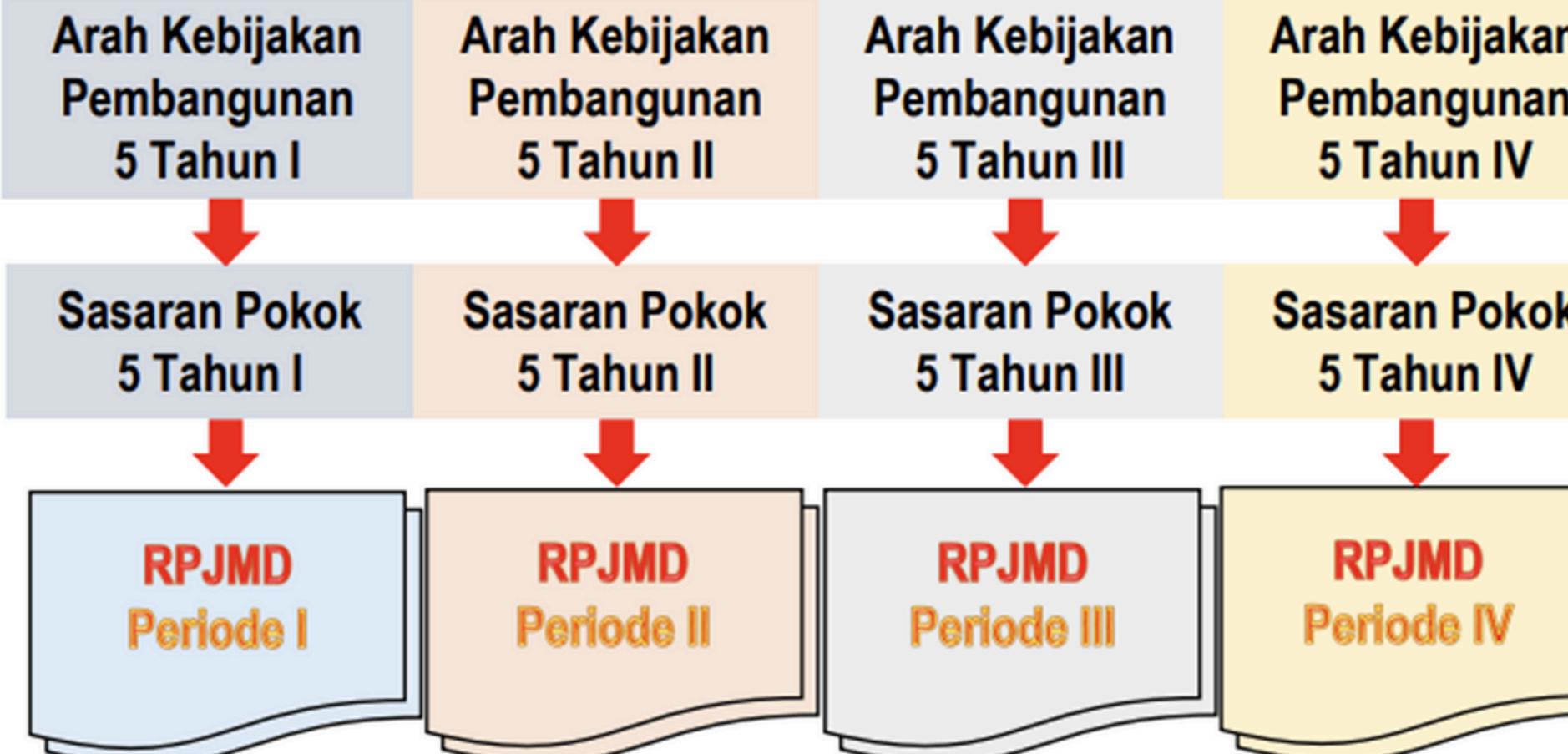
KETERHUBUNGAN ANTARDOKUMEN (RPJPD vs RPJMD)

RPJPD

VISI & MISI 20 TH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH



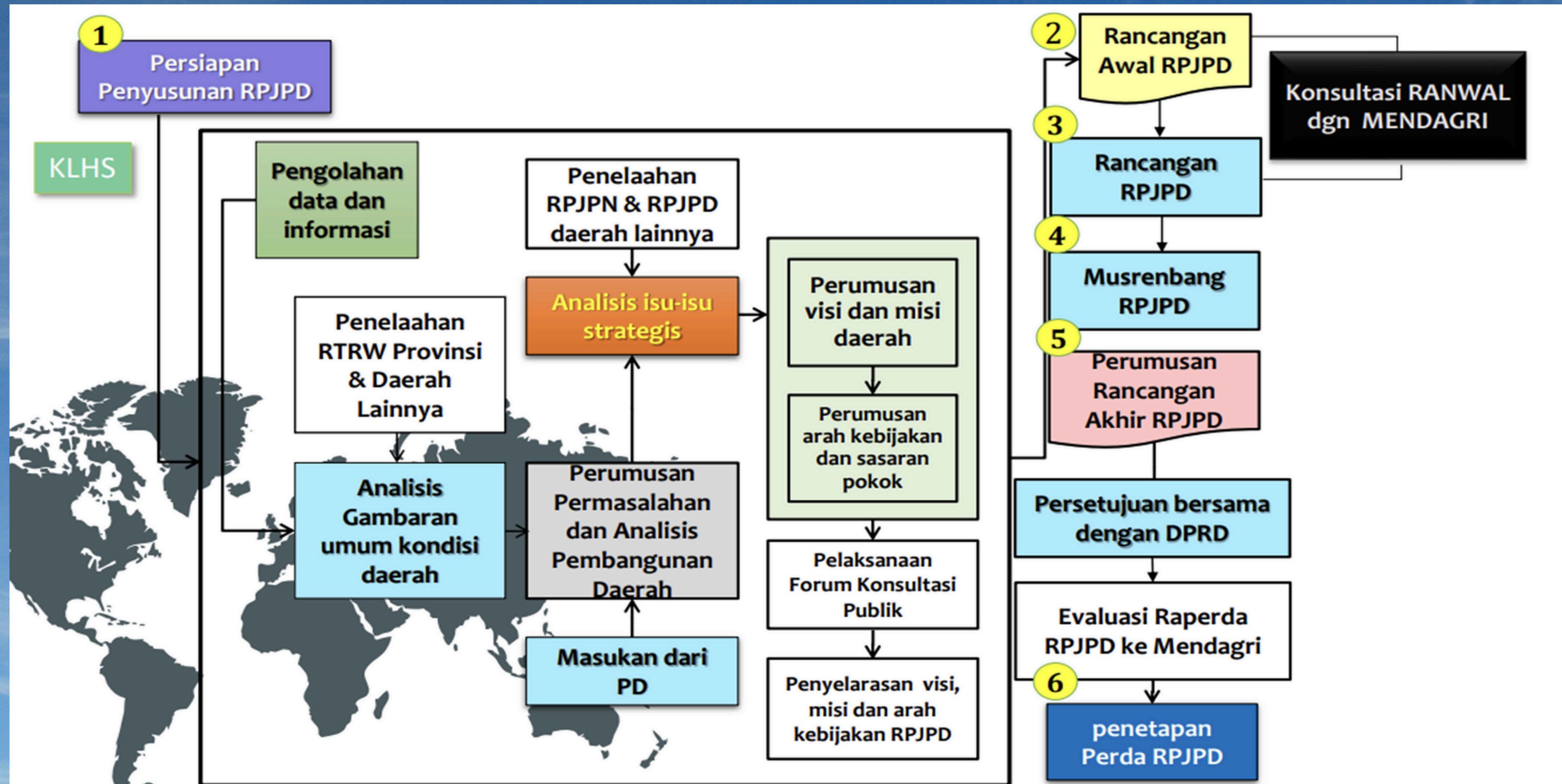
Pmdn 86/17
Pasal 168

Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan

Pmdn 86/17
Pasal 160

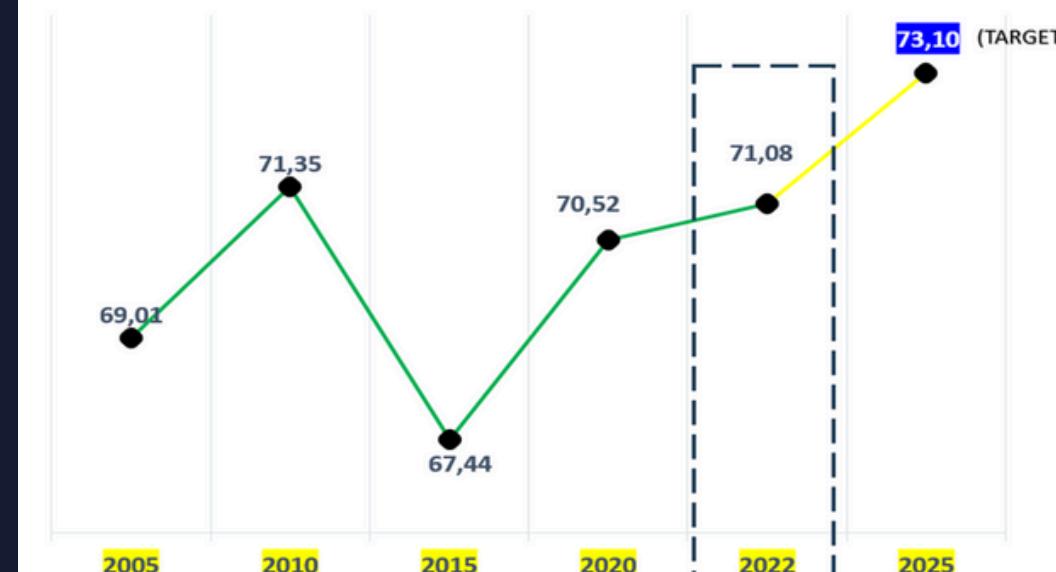
mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD



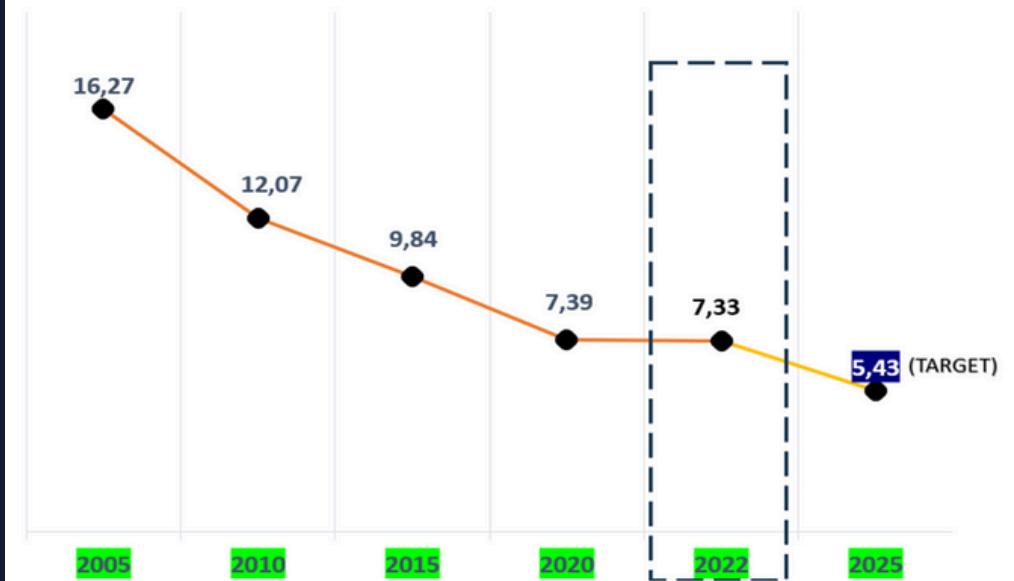
MUSRENBANG PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN BANGGAI 2025-2045





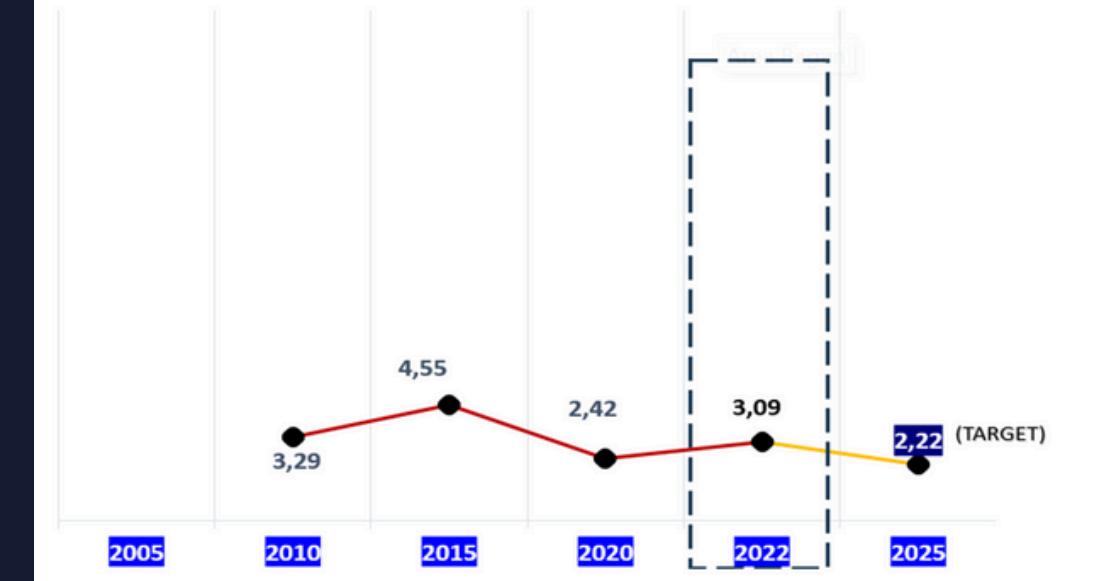
IPM

Selama periode RPJPD 2005–2025, IPM Kab. Banggai mengalami fluktusi. Pada tahun 2010-2014 terjadi perubahan perhitungan IPM yang menyebabkan terjadi penurunan, namun kembali membaik pada peiode berikutnya, hingga pada tahun 2022 IPM Kab. Banggai mencapai 71,08, Target pada tahun 2025 yaitu sebesar 73,10.



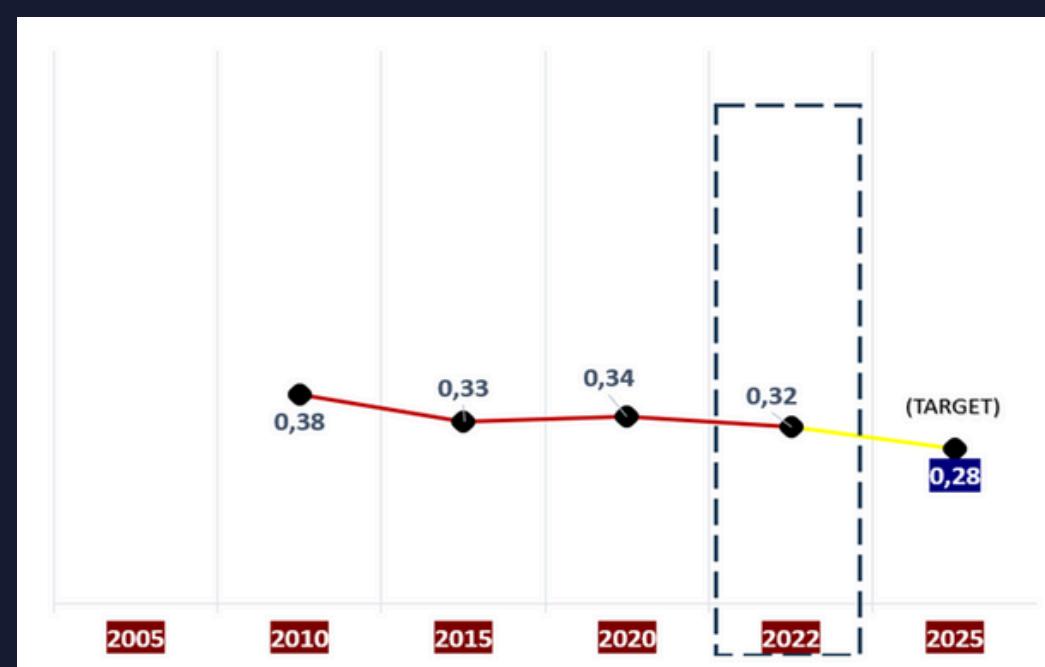
ANGKA KEMISKINAN (%)

Selama periode RPJPD 2005–2025, Angka Kemiskinan Kab. Banggai terus menurun, hingga pada tahun 2022 Angka Kemiskinan Kab. Banggai mencapai 7,33 persen, angka ini merupakan angka terendah kedua jika dibandingkan dengan capain 12 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Sulteng. Target pada tahun 2025 yaitu sebesar 5,43 persen



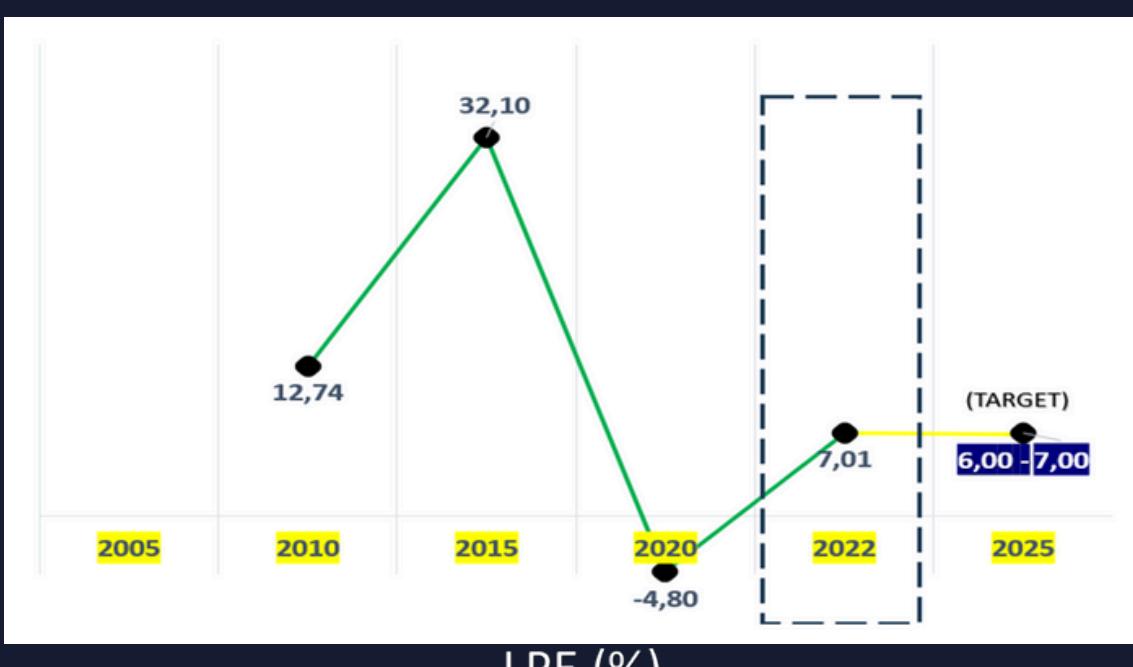
TPT(%)

Selama periode RPJPD 2005–2025, TPT Kab. Banggai mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2022 TPT Kab. Banggai mencapai 3,09 persen. Target pada tahun 2025 yaitu sebesar 2,22 persen



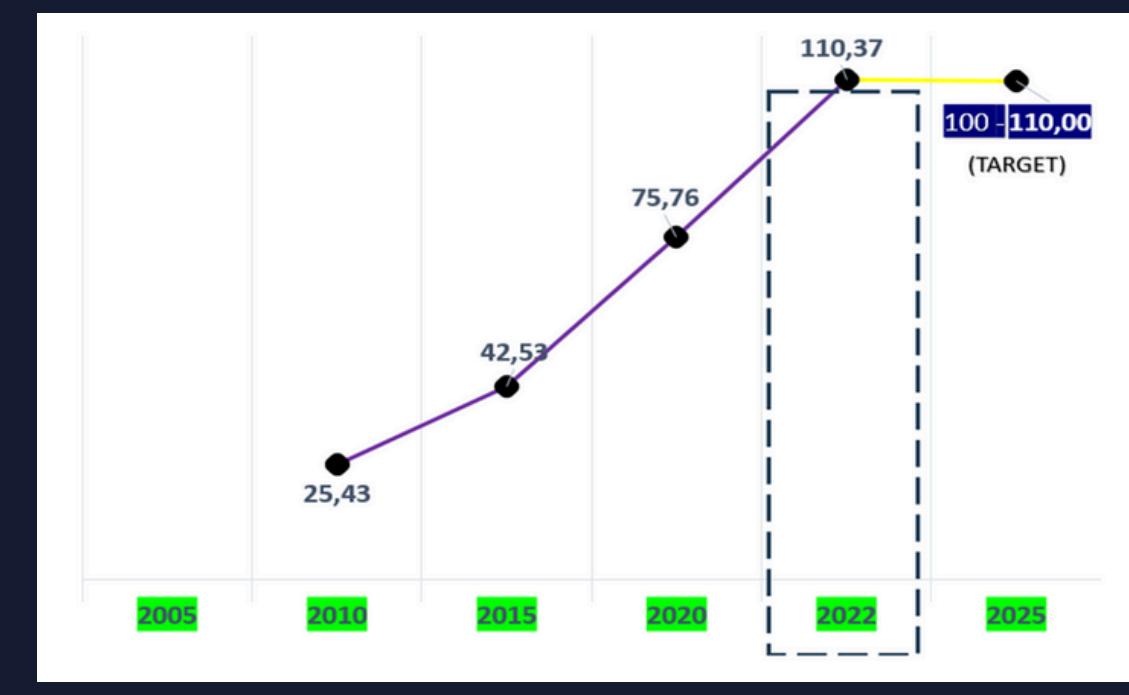
Rasio Gini

Selama periode RPJPD 2005–2025, Rasio Gini Kab. Banggai cenderung fluktuatif, meskipun demikian Rasio Gini Kabupaten Banggai masuk dalam kategori ketimpangan "sedang"



LPE(%)

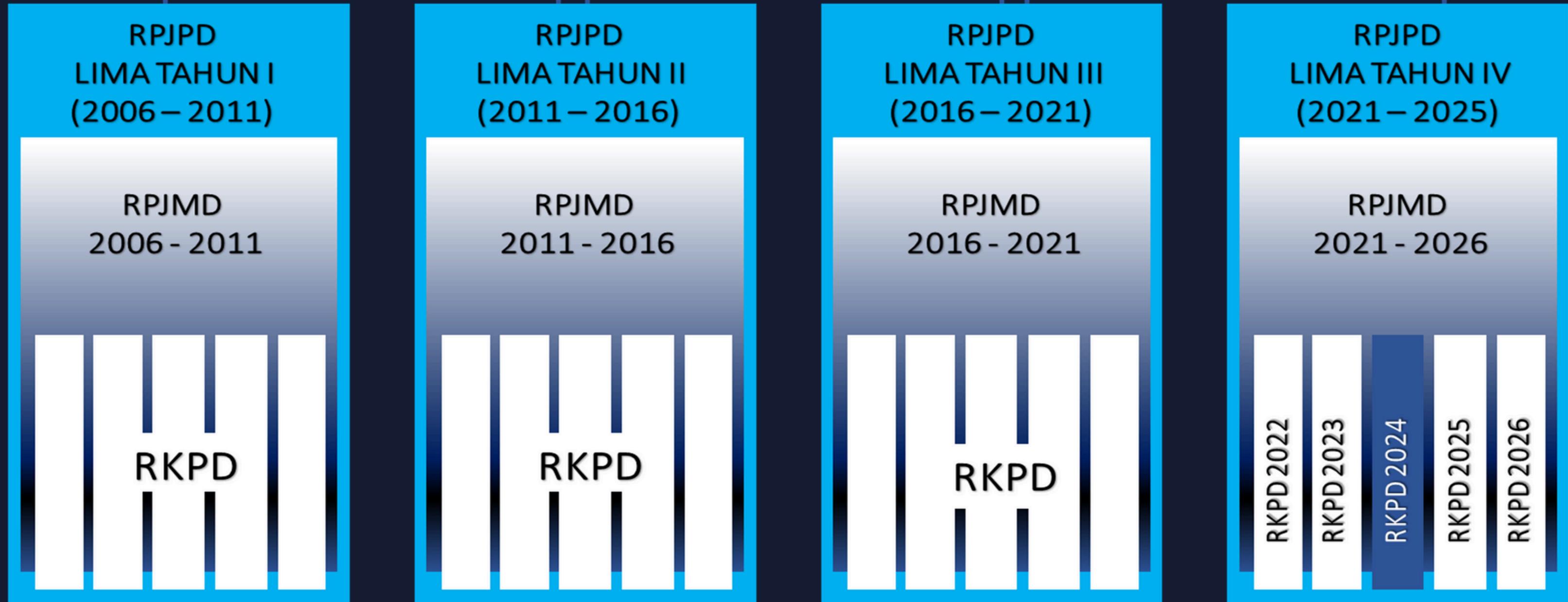
Selama periode RPJPD 2005–2025, LPE Kab. Banggai cenderung fluktuatif, di tahun 2020 mengalami kontraksi sampai -4,80 persen disebabkan oleh pandemic covid 19. yang kemudian tumbuh positif mencapai 7,01 persen pada tahun 2022 seiring pulihnya aktivitas ekonomi pasca covid 19. Target pada tahun 2025 yaitu sebesar 6,00-7,00 persen.



PDRB PERKAPITA (Juta Rupiah)

Selama periode RPJPD 2005–2025, PDRB Perkapita Kab. Banggai cenderung terus meningkat, hingga pada tahun 2022 PDRB Perkapita Kab. Banggai mencapai Rp.110,37 juta. Target pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp.100- 110 juta.

POSISI RKPD KABUPATEN BANGGAI 2025



RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan RKPD ketiga dari pelaksanaan RPJMD 2021–2026.

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025



PERSIAPAN

- PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPD
- ORIENTASI RKPD
- PENYUSUNAN AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RKPD
- [ENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PPD BERDASARKAN SIPD

RANCANGAN AWAL

- DI MULAI PADA MINGGU PERTAMA BULAN DESEMBER 2022
- BERPEDOMAN PADA RPJMD, RANWAL RKPD PROPINSI, RKP, PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD.
- DI BAHAS BERSAMA PD DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM FORUM KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN

- PENYEMPURNAAN RANCANGAN RKPD
- DI SELESAIKAN PALING LAMBAT MINGGU PERTAMA BULAN APRIL.
- DI BAHAS DALAM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN, YANG DI LAKSANAKAN PALING LAMBAT MINGGU IV MARET..

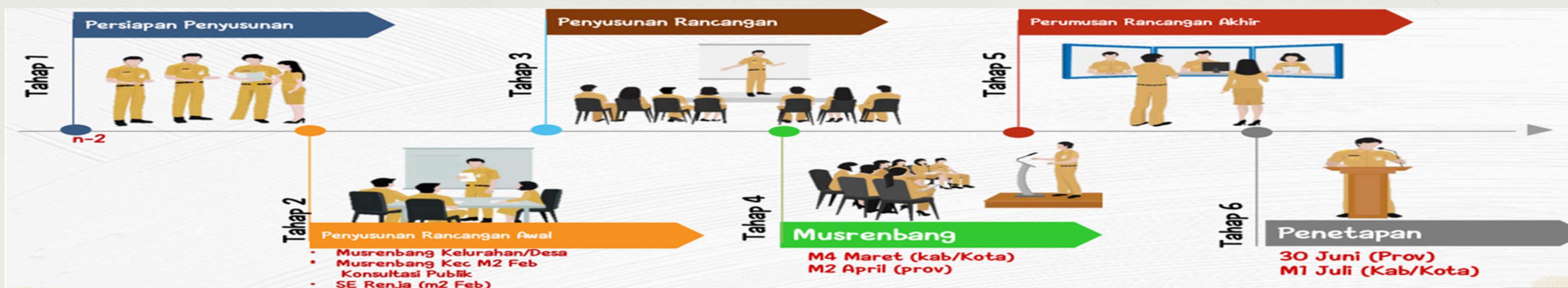
RANCANGAN AKHIR

- PENYEMPURNAAN RANKHIR RKPD
- PEMBAHASAN DI LAKUKAN PALING LAMBAT 1 MINGGU SESUDAH PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN, DENGAN SELURUH PD.
- RANCANGAN AKHIR DI SELESAIKAN PALING LAMBAT AKHIR BULAN MEI 2023.

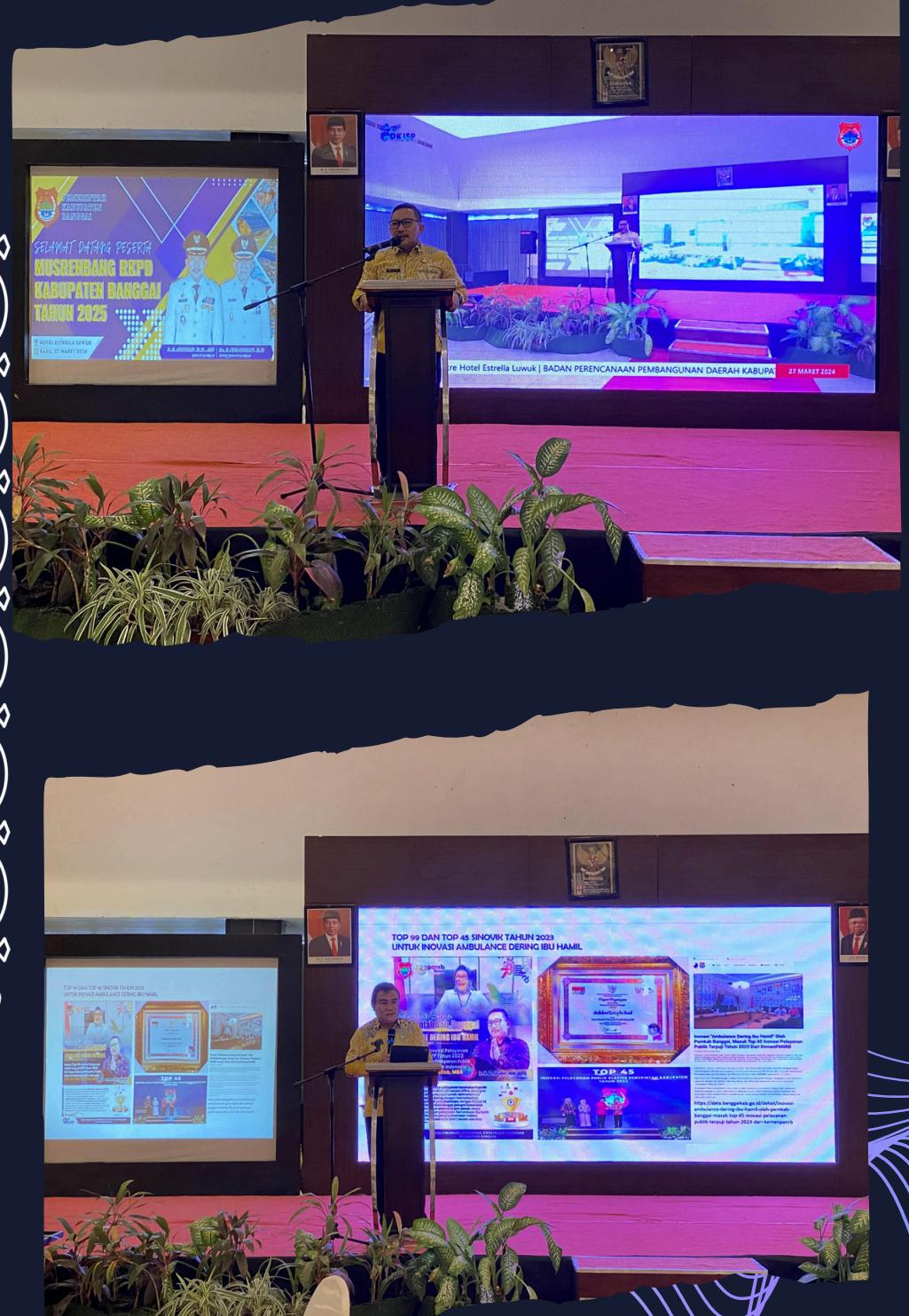
- RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RKPD
- FASILITASI PROPINSI
- PENETAPAN RKPD 2024 (PALING LAMBAT SATU MINGGU SETELAH RKPD PROPINSI 2024 DI TETAPKAN)



**Tugas Bappedalitbang
Memastikan Bawa
RKPD Di Susun Tepat
Waktu, Tepat Proses
Dan Tepat Isi**



MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

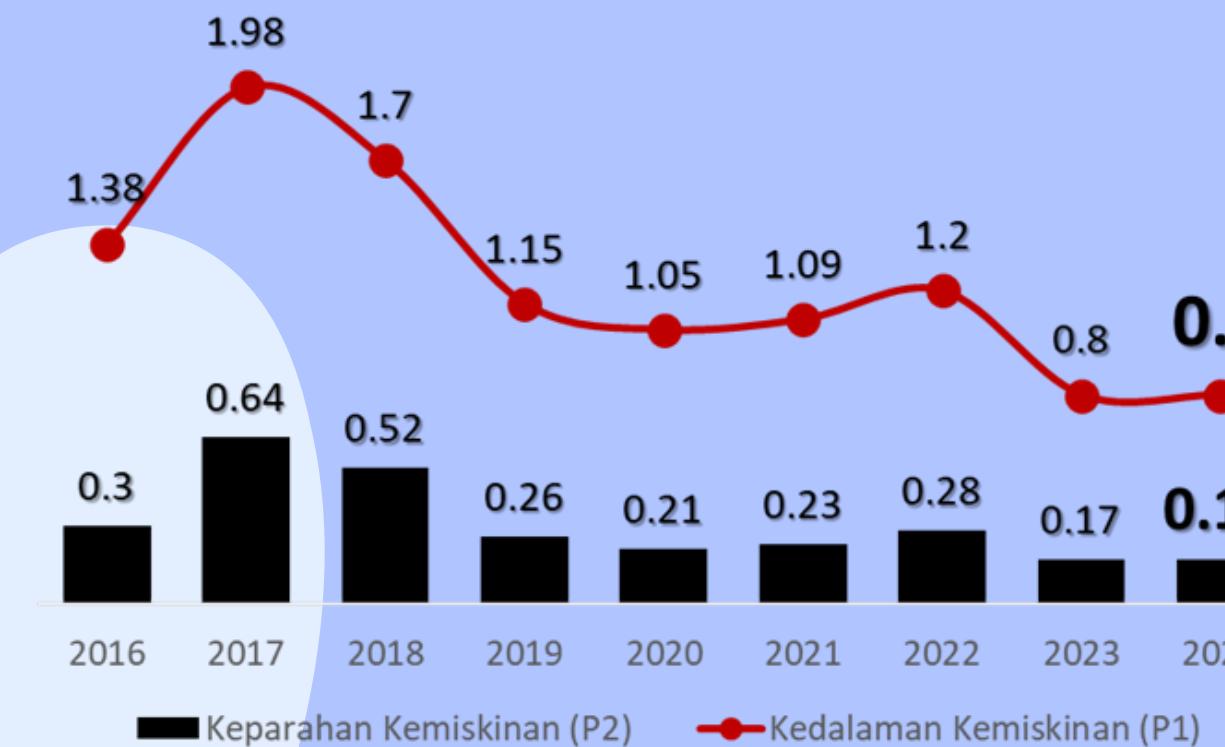
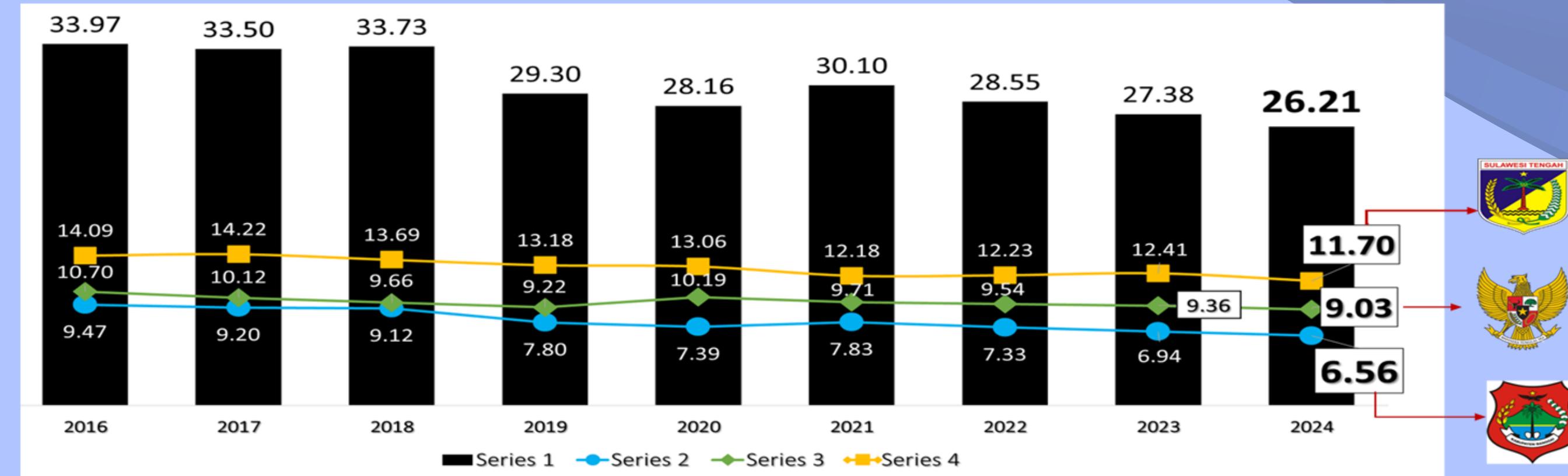




*Bidang Perencanaan Pemerintahan
& Sosial Budaya
BAPPEDA*



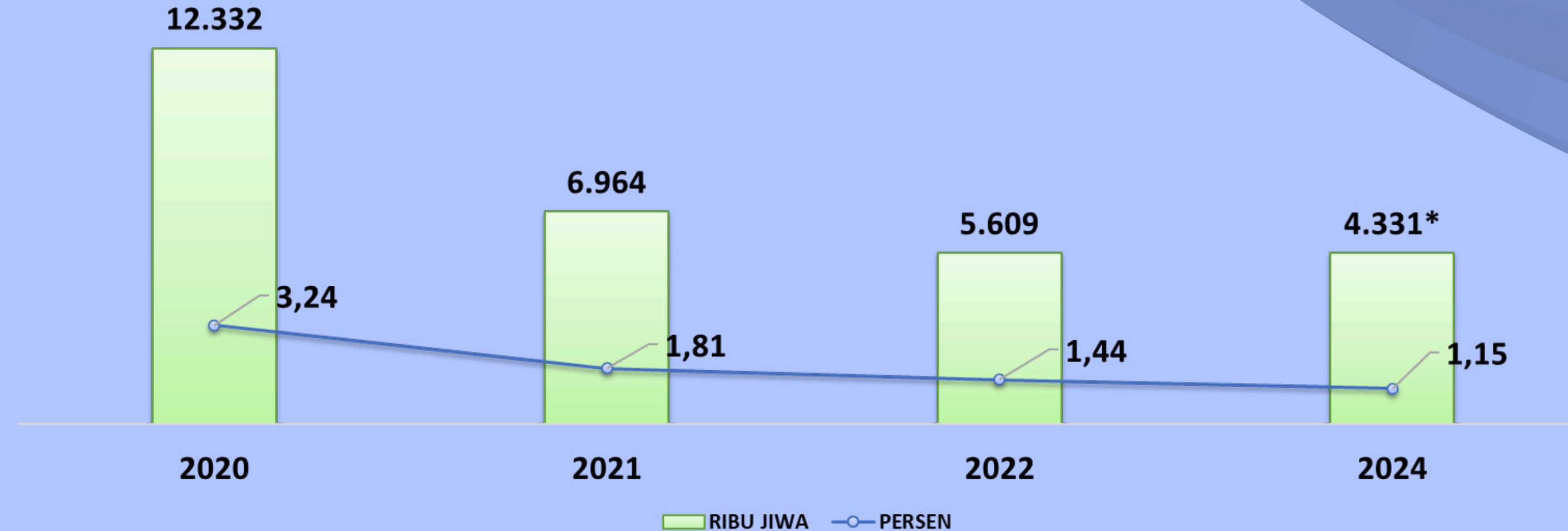
ANGKA KEMISKINAN



TABEL KEMISKINAN MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024					
NAMA	Jml Penduduk Miskin (dalam ribuan)	Percentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Banggai Kepulauan	14,86	12,32	1,26	0,22	453.552
Banggai	26,21	6,56	0,86	0,17	515.334
Morowali	14,99	11,55	1,79	0,43	590.027
Poso	39,63	14,23	1,97	0,45	620.267
Donggala	47,68	15,30	3,00	0,75	438.396
Toli-Toli	30,39	12,45	1,73	0,42	441.975
Buol	23,05	13,08	2,20	0,47	477.640
Parigi Moutong	74,57	14,20	3,36	1,08	553.012
Tojo Una-Una	26,12	16,36	2,04	0,40	622.000
Sigi	29,80	12,06	2,52	0,70	463.011
Banggai Laut	11,16	13,78	1,76	0,35	443.877
Morowali Utara	16,74	11,95	1,89	0,39	594.137
Kota Palu	24,57	5,94	0,65	0,09	658.112
Prov Sulawesi Tengah	379,76	11,77	2,10	0,53	600.872

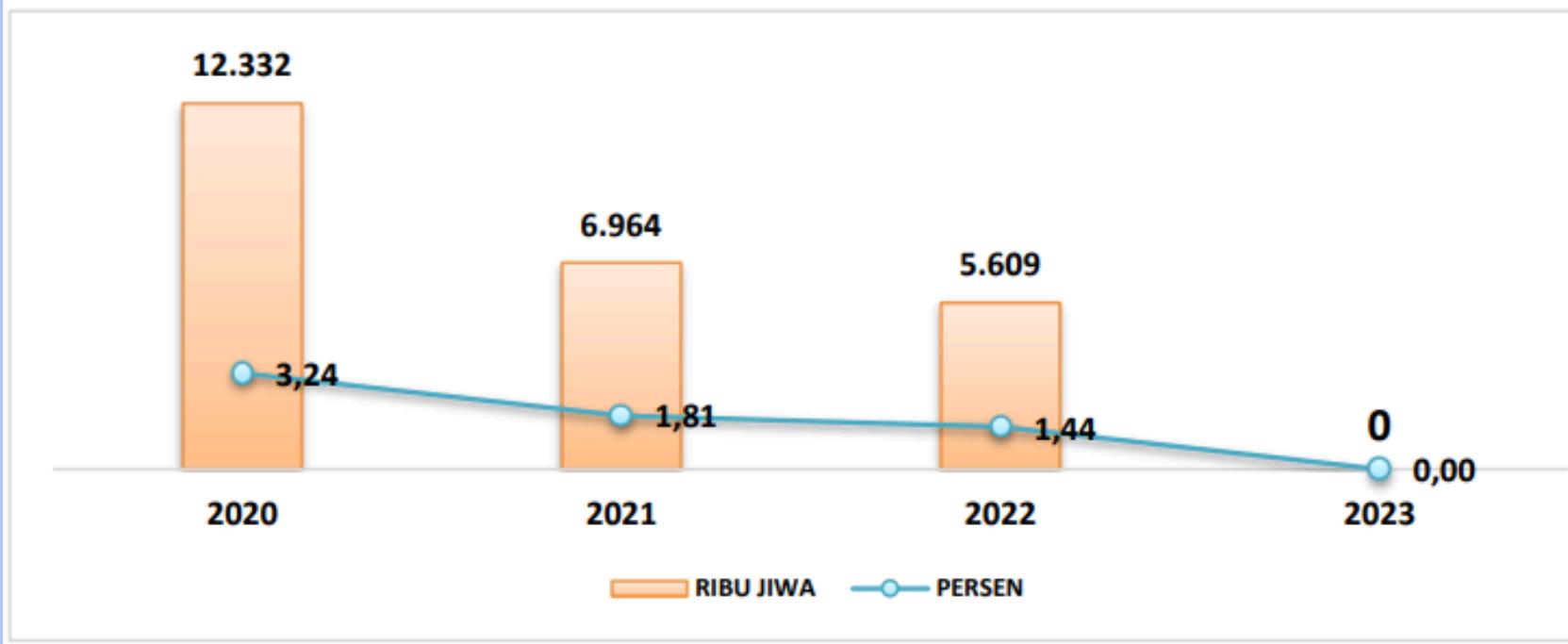


KEMISKINAN EKSTRIM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020-2024

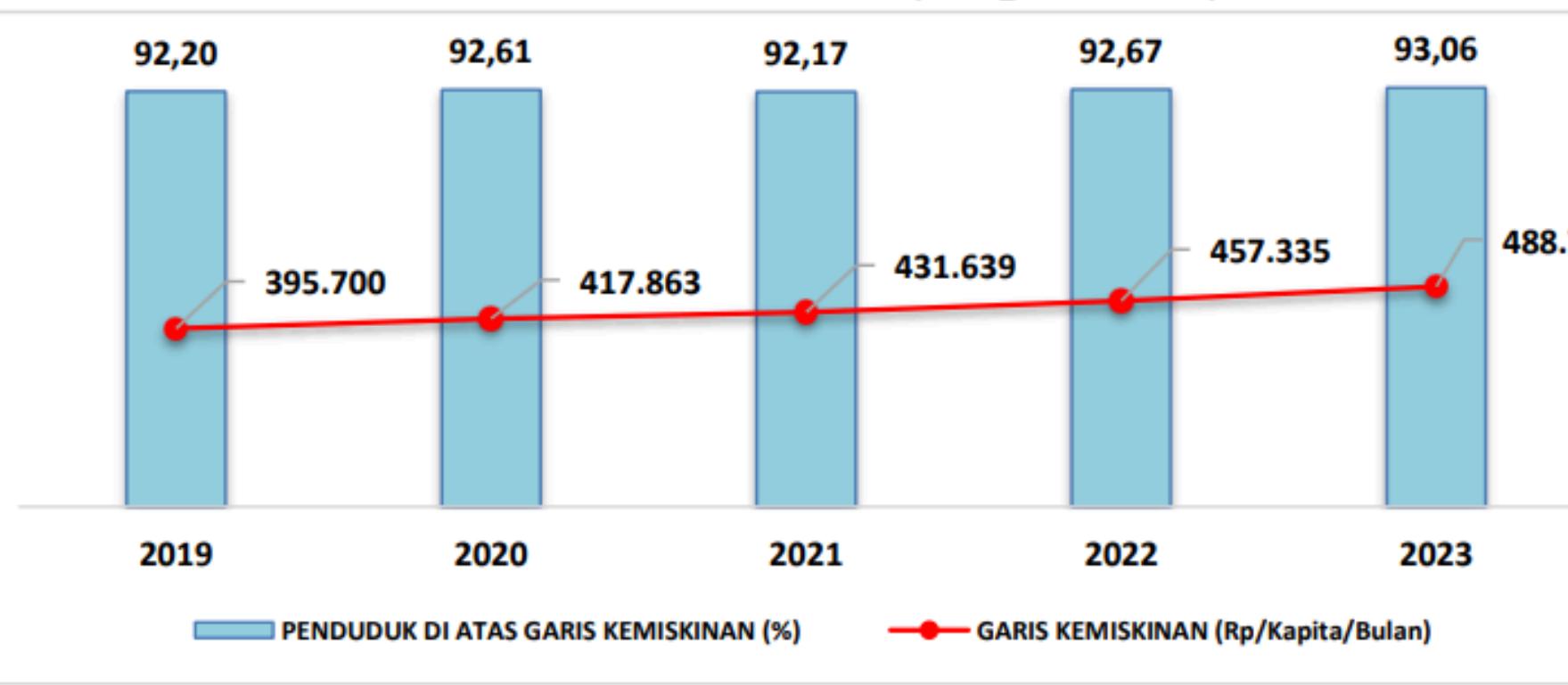


Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan dari 3,24% menjadi 1,15%. Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrim dari 12.332 Jiwa (2020) menjadi 4.331 Jiwa (2024).

Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai tahun 2020-2023 (Ribu Jiwa, %)

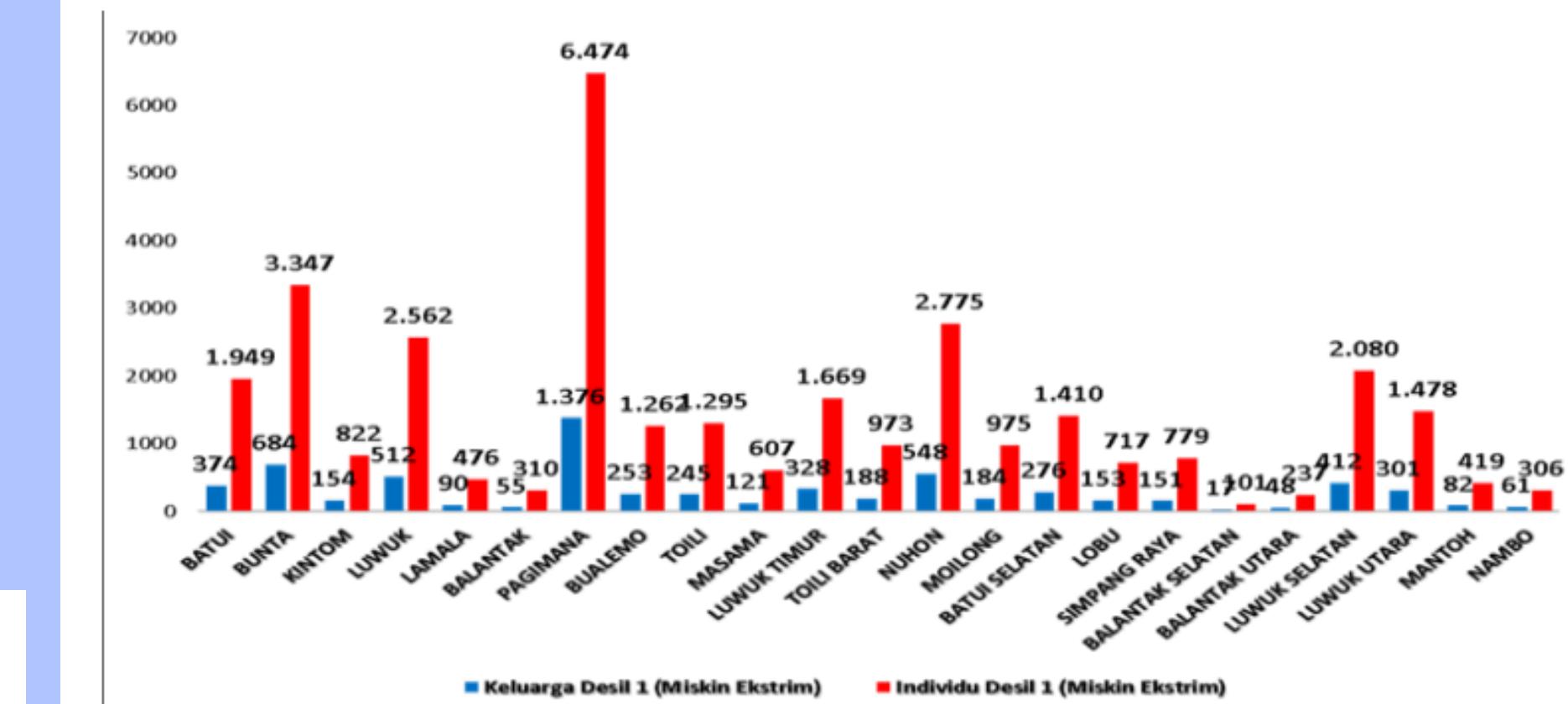


Garis Kemiskinan dan Presentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023 (Rupiah, %)



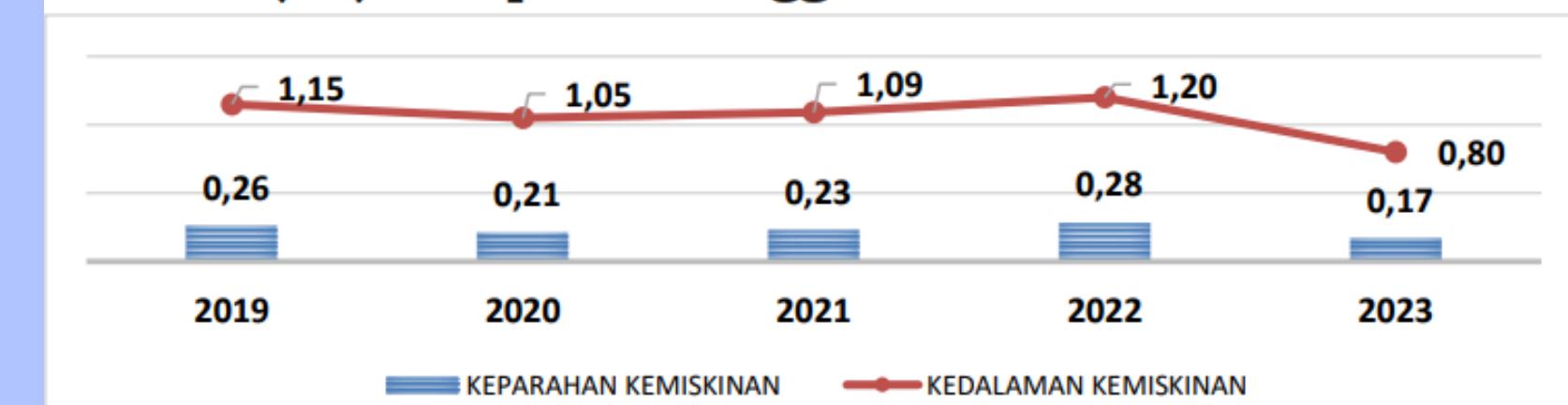
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2024

Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) keluarga Dan Individu Desil 1 Kab. Banggai Tahun 2021



Sumber: Kemenko PMK, P3KE, diolah Bappeda Kab. Banggai, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 dan Indeks Keparahan (P2) Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2024



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)



- Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 201,86 ribu orang
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sakernas Agustus 2023 sebesar 3,12 persen, naik 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 yang sebesar 3,09 persen.
- Penduduk yang bekerja sebanyak 195,56 ribu orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 119,04 ribu orang, sementara penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 76,52 ribu orang.
- Lapangan pekerjaan yang memiliki persentase penduduk bekerja paling tinggi adalah sektor pertanian (85,97 ribu orang), kedua tertinggi adalah sektor jasa-jasa (72,34 ribu orang) dan terakhir adalah sektor manufaktur (37,26 ribu orang).
- Sebanyak 80,20 ribu orang yang bekerja, memiliki tingkat pendidikan SD/sederajat ke bawah. Dengan kata lain, sebesar 41,01 persen penduduk yang bekerja berpendidikan paling tinggi SD/sederajat.
- Berdasarkan status pekerjaannya, diantara penduduk yang bekerja paling banyak berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sebanyak 57,45 ribu orang atau 29,38 persen penduduk yang bekerja, bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.
- Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi sebesar 9,10 persen pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

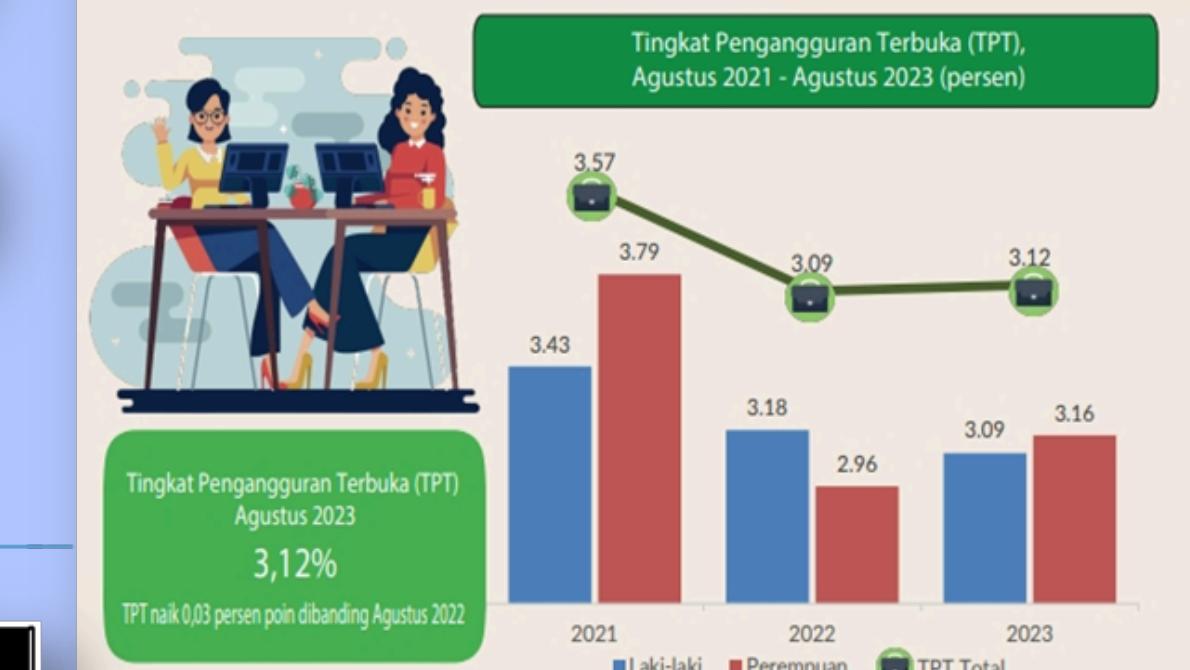
TPT KABUPATEN/KOTA SE SULTENG 2023

Kabupaten/ Kota	Agustus 2021		
	Agustus 2021 persen	Agustus 2022 persen	Agustus 2023 persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Banggai Kepulauan	2,95	1,48	1,56
Banggai	3,57	3,09	3,12
Morowali	5,08	3,20	2,84
Poso	2,47	1,68	1,67
Donggala	3,50	2,84	2,79
Tolitoli	3,13	3,31	3,12
Buol	3,64	3,07	3,14
Parigi Moutong	2,97	1,71	2,11
Tojo Una-Una	3,44	3,05	2,83
Sigi	2,38	3,01	2,60
Banggai Laut	3,35	3,60	3,64
Morowali Utara	2,98	2,25	2,23
Palu	7,61	6,15	5,65
Sulawesi Tengah	3,75	3,00	2,95

Sumber Data : BPS Sulteng 2023

KEADAAN KETENAGAKERJAAN, KABUPATEN BANGGAI AGUSTUS 2023

Berita Resmi Statistik No. 49/12/Th. I, 11 Desember 2023



Percentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2021 - Agustus 2023



*Bidang Perencanaan Pembangunan
Manusia & Masyarakat*

BAPPEDA



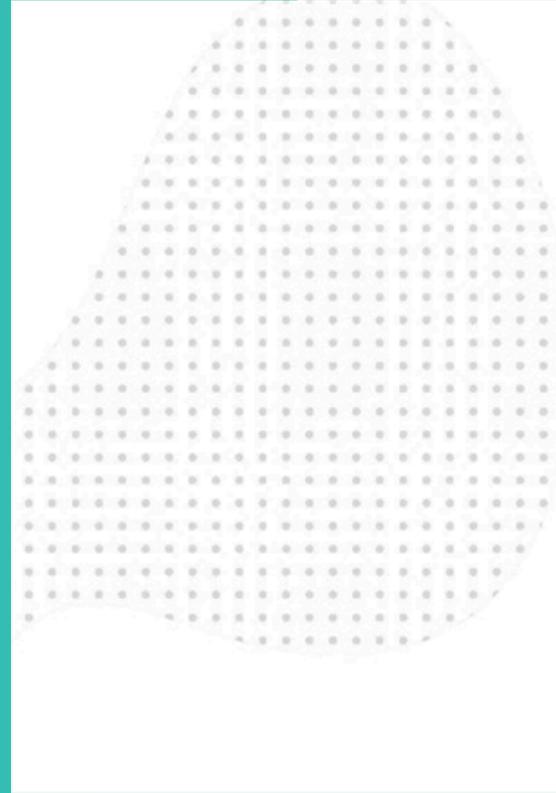
CROSS CUTTING PENCEGAHAN PENANGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI

Koordinasi Program, Kegiatan Intervensi

Bersama TAPD & Gugus Tugas

- Cross cutting program menggambarkan bahwa untuk penurunan prevalensi stunting di lakukan secara multisektor, terpadu dan terintegrasi.
- Cross cutting menggambarkan dengan jelas stakeholders yang terlibat di setiap tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- Upaya KONVERGENSI (koordinasi dan intervensi terintegrasi) pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi kunci utama keberhasilan penurunan prevalensi stunting





8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024





PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI

AKSI 1 : PIC – BAPPEDA
AKSI 2 : PIC – BAPPEDA
AKSI 3 : PIC – BAPPEDA
AKSI 4 : PIC – DINAS PMD
AKSI 5 : PIC – DINAS PMD
AKSI 6 : PIC – BAPPEDA
AKSI 7 : PIC – DINAS KESEHATAN
AKSI 8 : PIC – BAPPEDA



OUTPUT

- PENINGKATAN DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH DAN DESA
- ADANYA REGULASI DAERAH YANG RELEVAN
- PENINGKATAN SISTEM DATA, PUBLIKASI DAN PELAPORAN
- PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN SPESIFIK DAN SENSITIF
- PENINGKATAN CAKUPAN INTERVENSI BAGI SETIAP SASARAN PRIORITAS



CAPAIAN PREVALENSI STUNTING KABUPATEN BANGGAI



Target
Nasional
2024



PEMUTAKHIRAN TARGET STUNTING

Pemutakhiran Target
Prevalensi Stunting Nasional
dan Provinsi Tahun 2025 dan
2045

SURAT EDARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 17 MEI 2024

Sesuai hasil pemutakhiran, target prevalensi *stunting* nasional pada tahun 2025 mengalami perubahan dari sebesar 13,5% menjadi sebesar 18,8%. Penghitungan ini menggunakan pendekatan pencapaian target pada tahun 2045 sebesar 5% dengan skenario pengurangan jumlah *stunting* baru per tahunnya sebesar 25%;

PEMUTAKHIRAN TARGET PREVALENSI STUNTING NASIONAL DAN PROVINSI
TAHUN 2025 DAN 2045

Provinsi	Baseline (2023)	Target Prevalensi	
		2025	2045
Aceh	29,4%	25,5%	6,2%
Sumatera Utara	18,9%	16,4%	4,0%
Sumatera Barat	23,6%	20,5%	5,0%
Riau	13,6%	12,0%	3,6%
Jambi	13,5%	11,9%	3,5%
Sumatera Selatan	20,3%	18,0%	5,3%
Bengkulu	20,2%	17,7%	4,7%
Lampung	14,9%	13,2%	3,8%
Kepulauan Bangka Belitung	20,6%	18,3%	5,5%
Kepulauan Riau	16,8%	15,2%	5,8%
DKI Jakarta	17,6%	15,8%	5,6%
Jawa Barat	21,7%	19,0%	5,0%
Jawa Tengah	20,7%	18,0%	4,5%
Daerah Istimewa Yogyakarta	18,0%	16,1%	5,2%
Jawa Timur	17,7%	15,6%	4,4%
Banten	24,0%	21,3%	6,5%
Bali	7,2%	6,4%	2,2%
Nusa Tenggara Barat	24,6%	21,7%	6,2%
Nusa Tenggara Timur	37,9%	33,1%	8,4%
Kalimantan Barat	24,5%	21,8%	6,8%
Kalimantan Tengah	23,5%	20,6%	5,5%
Kalimantan Selatan	24,7%	21,6%	5,7%
Kalimantan Timur	22,9%	19,8%	4,7%
Kalimantan Utara	17,4%	15,1%	3,6%
Sulawesi Utara	21,3%	19,0%	5,9%
Sulawesi Tengah	27,2%	23,9%	6,7%
Sulawesi Selatan	27,4%	23,9%	6,1%
Sulawesi Tenggara	30,0%	26,1%	6,6%
Gorontalo	26,9%	23,8%	7,0%

**TARGET PREVALENSI
SULAWESI TENGAH
2025 = 23,9%
2045 = 6,7 %**

Rembug **Stunting**

Pencegahan dan Penanganan Stunting



TUJUAN

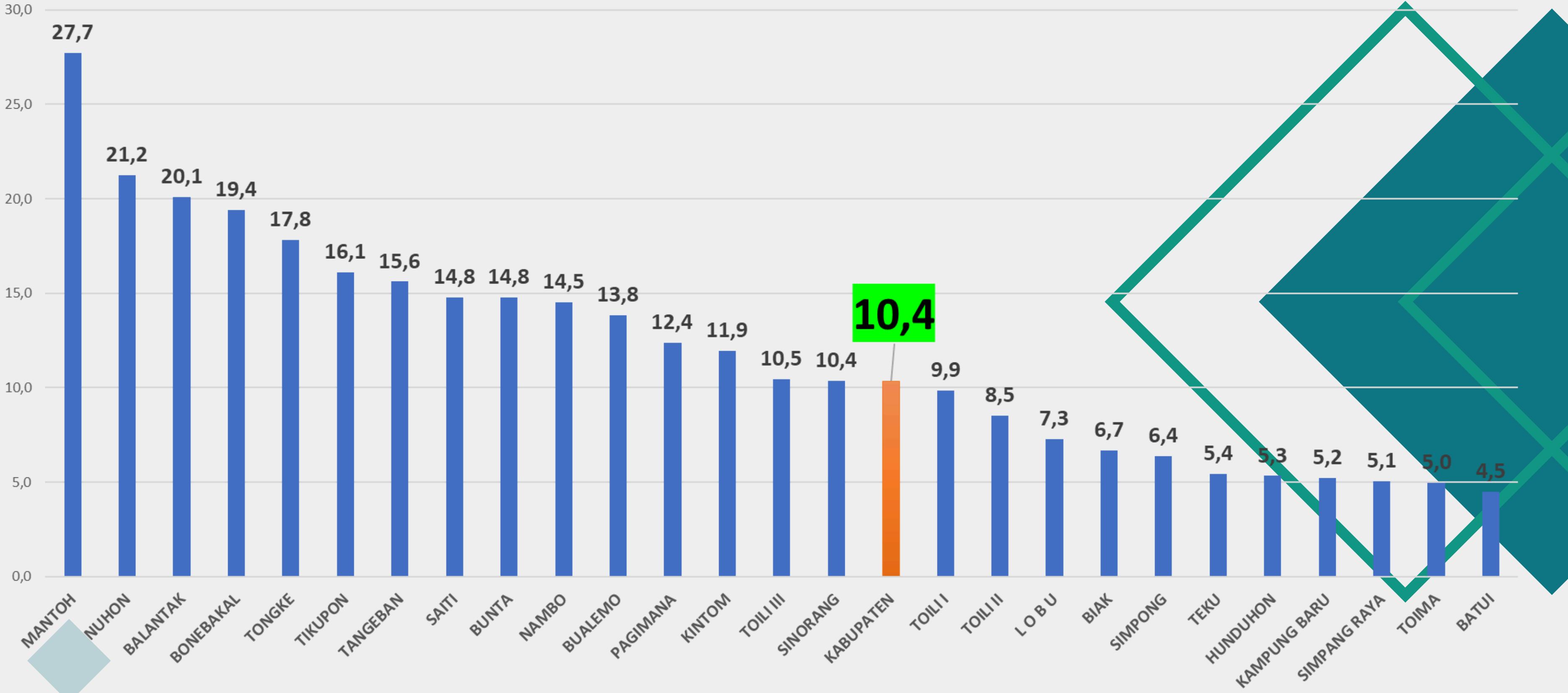
1. MENYAMPAIKAN HASIL ANALISIS SITUASI DAN RANCANGAN RENCANA KEGIATAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING KABUPATEN/KOTA TERINTEGRASI
2. MENDEKLARASIKAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DAN MENYEPAKATI RENCANA KEGIATAN INTERVENSI PENURUNAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
3. MEMBANGUN KOMITMEN PUBLIK DALAM KEGIATAN PENURUNAN STUNTING SECARA TERINTEGRASI DI KABUPATEN/KOTA

OUTPUT

1. KOMITMEN PENURUNAN STUNTING YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI, PERWAKILAN DPRD, KEPALA DESA, PIMPINAN OPD DAN PERWAKILAN SEKTOR NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
2. RENCANA KEGIATAN INTERVENSI GIZI TERINTEGRASI PENURUNAN STUNTING YANG TELAH DISEPAKATI OLEH LINTAS SEKTOR UNTUK DIMUAT DALAM RKPD/RENJA OPD TAHUN BERIKUTNYA

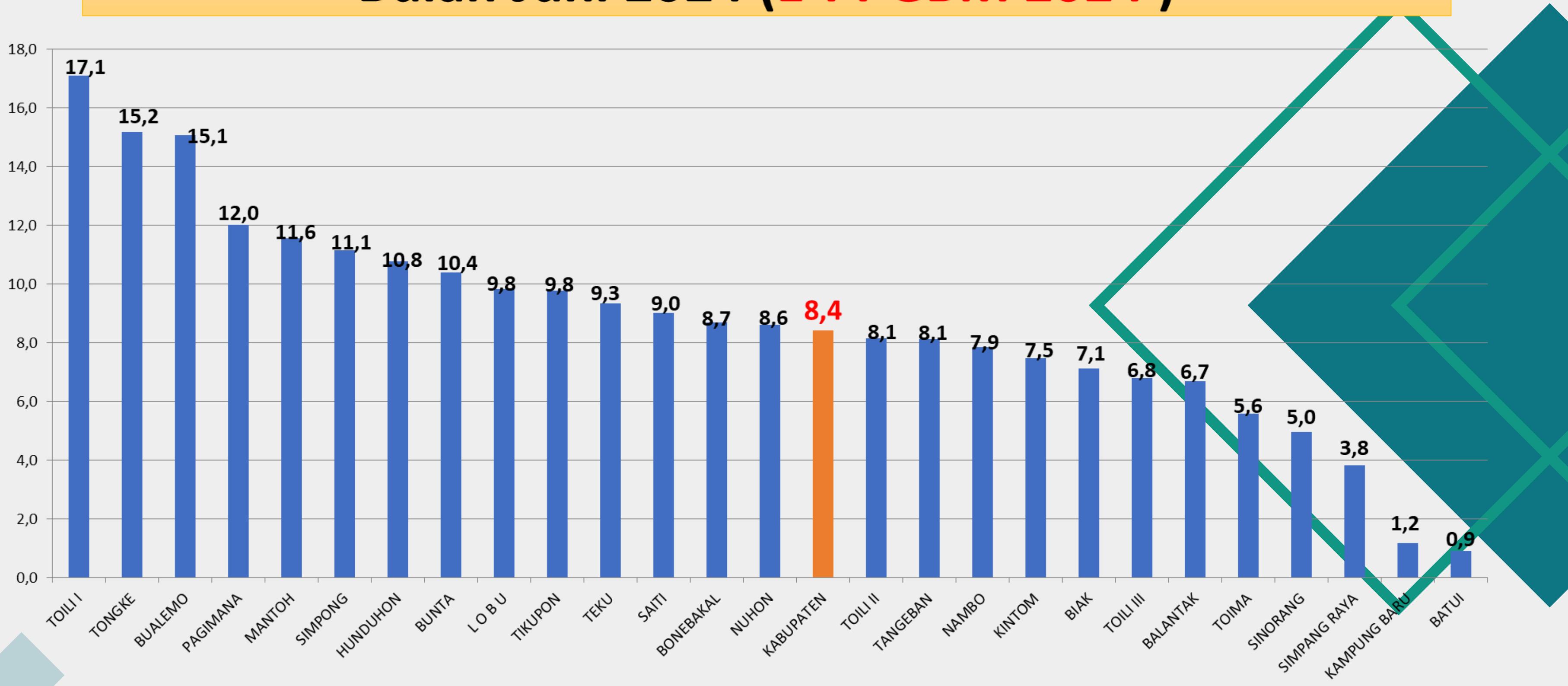
PERSENTASE BALITA STUNTING KAB.BANGGAI

BULAN JUNI 2024 (E-PPGBM 2024)



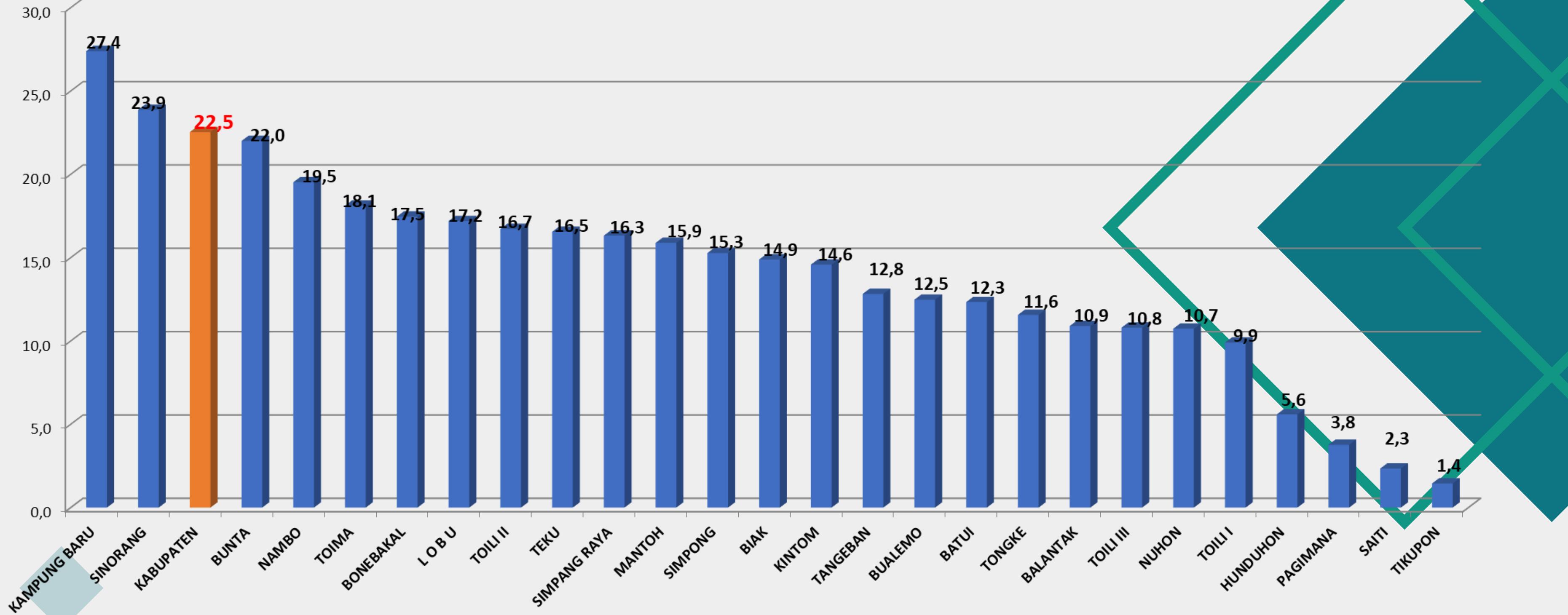
Persentase Balita Gizi Kurang (Wasting) Kab. Banggai

Bulan Juni 2024 (E-PPGBM 2024)



Persentase Balita Berat Badan Kurang (Underweight) Kab. Banggai

Bulan Juni 2024 (E-PPGBM 2024)





MASTER ANSIT (ANALISIS SITUASI)

I Data Sasaran

- 1) Data dasar yang disiapkan pemerintah kabupaten/kota tentang data keluarga berisiko *stunting*, data sebaran *stunting* dan angka prevalensi *stunting* yang dirinci setiap desa/kelurahan;
- 2) Nilai capaian berdasarkan ketersediaan data untuk seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota;

II Data Cakupan Layanan (Esensial)

- 1) Prosentase cakupan layanan program/kegiatan terhadap 29 indikator esensial yang disediakan sesuai OPD pengampu layanan untuk setiap desa/kelurahan;
- 2) Nilai capaian berdasarkan ketersediaan data untuk seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota;

III Data Cakupan Layanan (Supply)

- 1) Data capaian layanan program/kegiatan dalam pemenuhan indikator yang ditetapkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* disediakan oleh OPD pengampu layanan;
- 2) Nilai capaian berdasarkan ketersediaan data untuk semua indikator yang ditentukan di kabupaten/kota;

IV Pemetaan Program

- 1) Seluruh data program/kegiatan yang mendukung percepatan penurunan *stunting* yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD penanggungjawab;
- 2) Nilai capaian berdasarkan ketersediaan data program/kegiatan kabupaten/kota untuk tahun berjalan;

MASTER ANSIT
Analisa Situasi

Data Sasaran - Kabupaten Banggai - DIVERIFIKASI

Download Data

Search:

Show 10 entries

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	Presentase	Jumlah Balita	Balita Sangat Pendek	Balita Pendek	Presentase	Action Button
1	Tolli	Tolli II	Tohti Sari	552	367	66,49%	194	1	2	1,55%	Verified
2	Tolli	Tolli II	Piondo	359	236	65,74%	104	1	3	3,85%	Verified
3	Tolli	Tolli II	Bukit Jaya	534	290	54,31%	127	0	3	2,36%	Verified
4	Tolli	Tolli II	Tolisu	728	424	58,24%	207	0	5	2,42%	Verified
5	Tolli	Tolli II	Tirta Kencana	483	296	61,28%	149	1	3	2,68%	Verified
6	Tolli	Tolli II	Tirta Sari	442	263	59,50%	135	2	7	6,67%	Verified
7	Tolli	Tolli II	Sentral Sari	455	278	61,10%	129	1	2	2,33%	Verified
8	Tolli	Tolli II	Cendanapura	570	362	63,51%	177	3	9	6,78%	Verified
9	Tolli	Tolli II	Singkoyo	508	306	60,24%	179	3	7	5,59%	Verified
10	Tolli	Tolli II	Rusa Kencana	719	408	56,75%	235	0	2	0,85%	Verified

Showing 1 to 10 of 337 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 34 Next



MASTER ANSIT (ANALISIS SITUASI)

CAKUPAN LAYANAN ESSENSIAL (29 indikator)

Berdasarkan data e-money BANGDA 2024

REMATRI		TARGET	CAPAIAN
1	% Remaja putri konsumsi TTD	58%	75,20%
2	% Remaja putri menerima pemeriksaan status anemia (Hemoglobin)	90%	75,20%
CATIN/PASANGAN USIA SUBUR		TARGET	CAPAIAN
3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90%	96,30%
4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90%	97,30%
5	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90%	97,20%
6	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	90%	97,50%
7	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90%	99,70%
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90%	99,70%
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90%	82,10%
IBU HAMIL		TARGET	CAPAIAN
10	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90%	99,70%
11	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80%	77,30%
12	Persentase Unmeet Need pelayanan keluarga berencana	7,4%	48,50%
13	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5%	4,00%

Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi		TARGET	CAPAIAN
14	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	80%	73,00%
15	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80%	99,70%
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90%	99,70%
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90%	79,80%
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90%	99,70%
19	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90%	94,30%
KELUARGA BERESIKO		TARGET	CAPAIAN
20	Keluarga yang Stop BABS	90%	60,20%
21	Keluarga yang melaksanakan PHBS	70%	45,20%
22	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90%	59,90%
23	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	70%	60,10%
24	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	90%	60,40%
25	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50%	71,30%
AIR MINUM DAN SANITASI		TARGET	CAPAIAN
26	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100%	95,40%
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	90%	93,20%
PERLINDUNGAN SOSIAL		TARGET	CAPAIAN
28	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90%	99,70%
29	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	90%	99,70%



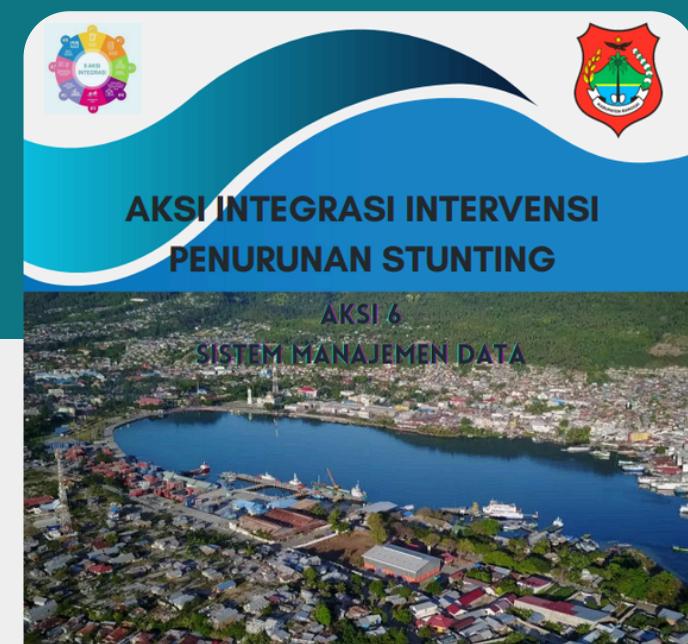
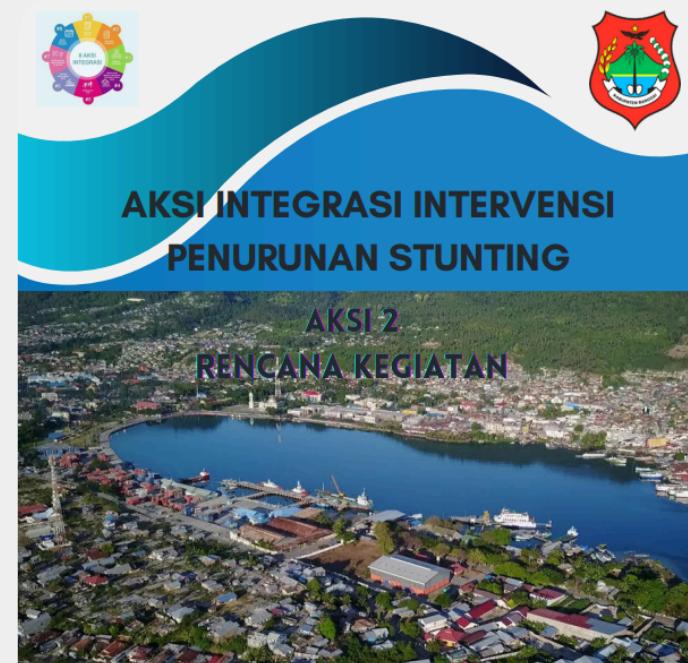
MASTER ANSIT (ANALISIS SITUASI)

CAKUPAN LAYANAN SUPPLY Berdasarkan data e-monev BANGDA 2024

DINAS PMD		TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	80%	100%
2	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90%	80%
3	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	100%	79%
4	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	100%	99%
5	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	90%	97%
6	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	100%	100%
7	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	90%	100%

DINAS KESEHATAN		TARGET	CAPAIAN
1	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	76,30%
2	Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) Stunting	50%	0,00%
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah bebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	90%	29,70%
4	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70%	100,00%
5	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90%	74,61%
6	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100%	89,90%
7	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	90%	60,50%

DINAS P2KBP3A		TARGET	CAPAIAN
1	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90%	100,0%
2	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	90%	100,0%
DINAS PENDIDIKAN		TARGET	CAPAIAN
1	Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	90%	22,8%
2	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	70%	71,5%



Tujuh Belas Tujuan SDGs



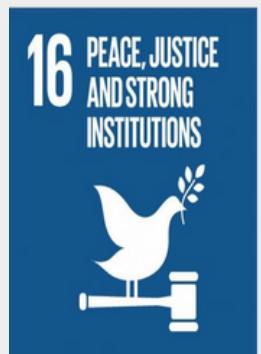
PILAR SOSIAL : Tujuan 1,2,3,4,5

- Memiliki 24 Target dan 58 indicator berdasarkan meta data 1 dan 24 Target 40 indicator berdasarkan meta data 2.
- Inti dari tujuan 1 adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
- inti dari Tujuan 2 adalah menghilangkan Kelaparan,mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik,meningkatkan pertanian berkelanjutan
- Inti dari Tujuan 3 adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh Penduduk dalam semua Usia
- Inti dari Tujuan 4 adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- Inti dari Tujuan 5 adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan



PILAR EKONOMI : Tujuan 7,8,9,10,17

- Memiliki 16 Target dan 25 indicator berdasarkan meta data 1 dan 17 Target 29 indicator berdasarkan meta data 2.
- Inti dari tujuan 7 adalah untuk menjamin Akses energy yang terjangkau,andal,berkelanjutan dan modern untuk semua
- inti dari Tujuan 8 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,kesempatan kerja yang menyeluruh,serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Inti dari Tujuan 9 adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh,meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
- Inti dari Tujuan 10 adalah untuk mengurangi kesenjangan
- Inti dari Tujuan 17 adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



PILAR LINGKUNGAN: Tujuan 6,11,12,13,14,15

- Memiliki 17 Target dan 37 indicator berdasarkan meta data 1 dan 22 Target 30 indicator berdasarkan meta data 2.
- Inti dari tujuan 6 adalah untuk menjamin Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- inti dari Tujuan 11 menjadikan kota dan pemukiman inklusif,aman,tangguh dan berkelanjutan
- Inti dari Tujuan 12 adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Inti dari Tujuan 13 adalah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- Inti dari Tujuan 14 adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan
- Inti dari tujuan 15 adalah untuk melindungi,merawat dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan,mengelola hutan secara lestari,menghentikan penggurunan,memulihkan degradasi lahan,serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA: Tujuan 16

- Memiliki 7 Target dan 23 indicator berdasarkan meta data 1 dan 9 Target 20 indicator berdasarkan meta data 2.
- Inti dari tujuan 16 adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,menyediakan akses untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif,akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Bagaimana SDG's berhasil....?

Keberhasilan SDG's tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah,karena pemerintah :

- Berada Lebih Dekat Dengan Warganya
- Memiliki Wewenang dan Dana
- Dapat Melakukan Berbagai Inovasi
- Ujung Tombak Penyedia Layanan Publik dan Berbagai Kebijakan Serta Program Pemerintah

Manfaat Best Practice & Daya Ungkit yang dilakukan PD Aisyiyah Kabupaten Banggai

Tanpa Kemiskinan :Peningkatan pendapatan
Tanpa Kelaparan : Tersedianya Pangan,

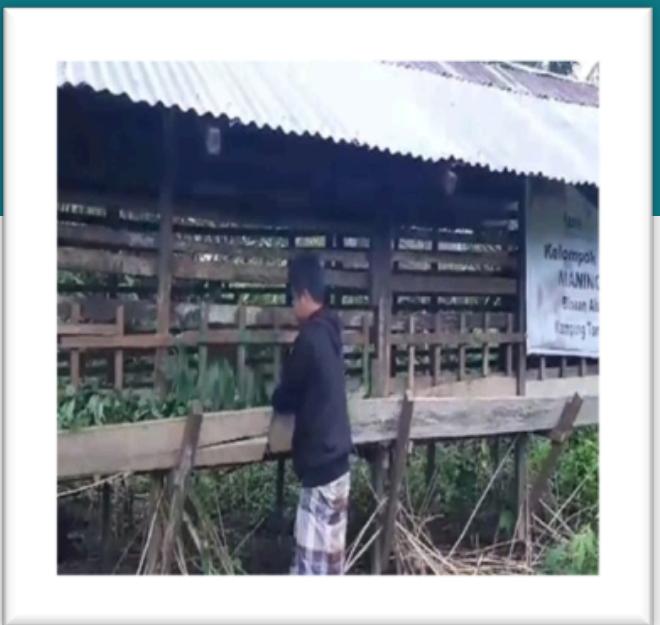
Sehat & Sejahtera :Perbaikan Gizi dan Turunkan Stunting,
Pendidikan Berkualitas : tersedianya sarana sekolah

Gender : Pengetahuan dan keterampilan budidaya Tanaman
Bawang,Jagung,Ubi Kayu,

sebagai salah satu bentuk Kerjasama yang di Lakukan PD Aisyiyah dengan PEMDA(Bappeda, Dinkes)JOB Pratamina Medco E&P Tomori Sulawesi,BAZNAS,Iazis mu,Rumah Zakat Indonesia dan Ormas dalam Mendukung Goals SDG's

KEIKUTSERTAAN PADA INDONESIA SDGs ACTION AWARD 2024

Best Practice PD Aisyiyah Kabupaten Banggai



Pelaksanaan Penilaian Tahap Wawancara Indonesia's SDGs Action Awards 2024

Pimpinan Daerah Aisyiyah
Merupakan salah satu Finalis yang
mendapat Undangan dari
Kementerian BAPPENAS Selaku
Sekretariat Nasional TPB/SDG's



PD Aisyiyah Banggai Masuk dalam Nominasi Kategori Organisasi Masyarakat dengan menyisihkan sebanyak 45 Ormas dari 48 yang ikut dalam Giat Indonesia Action Awards 2024, yang pengumuman nanti di bulan Oktober untuk menentukan Juara 1,2 & 3, In Sya Allah Mendapat Juara 1.mewakili Kabupaten Banggai

DOKUMENTASI RAPAT FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN RAD TPB/SDGS KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

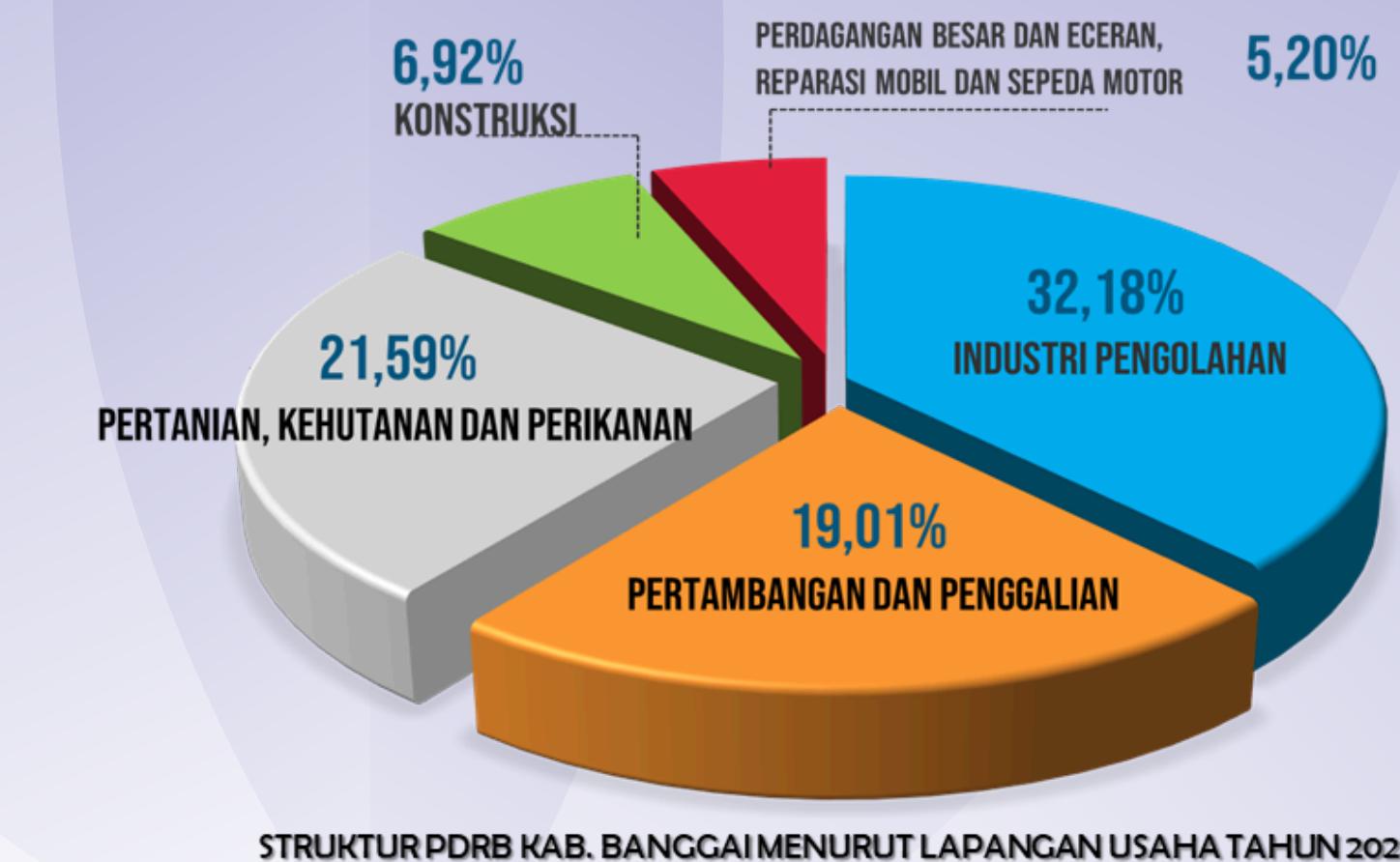
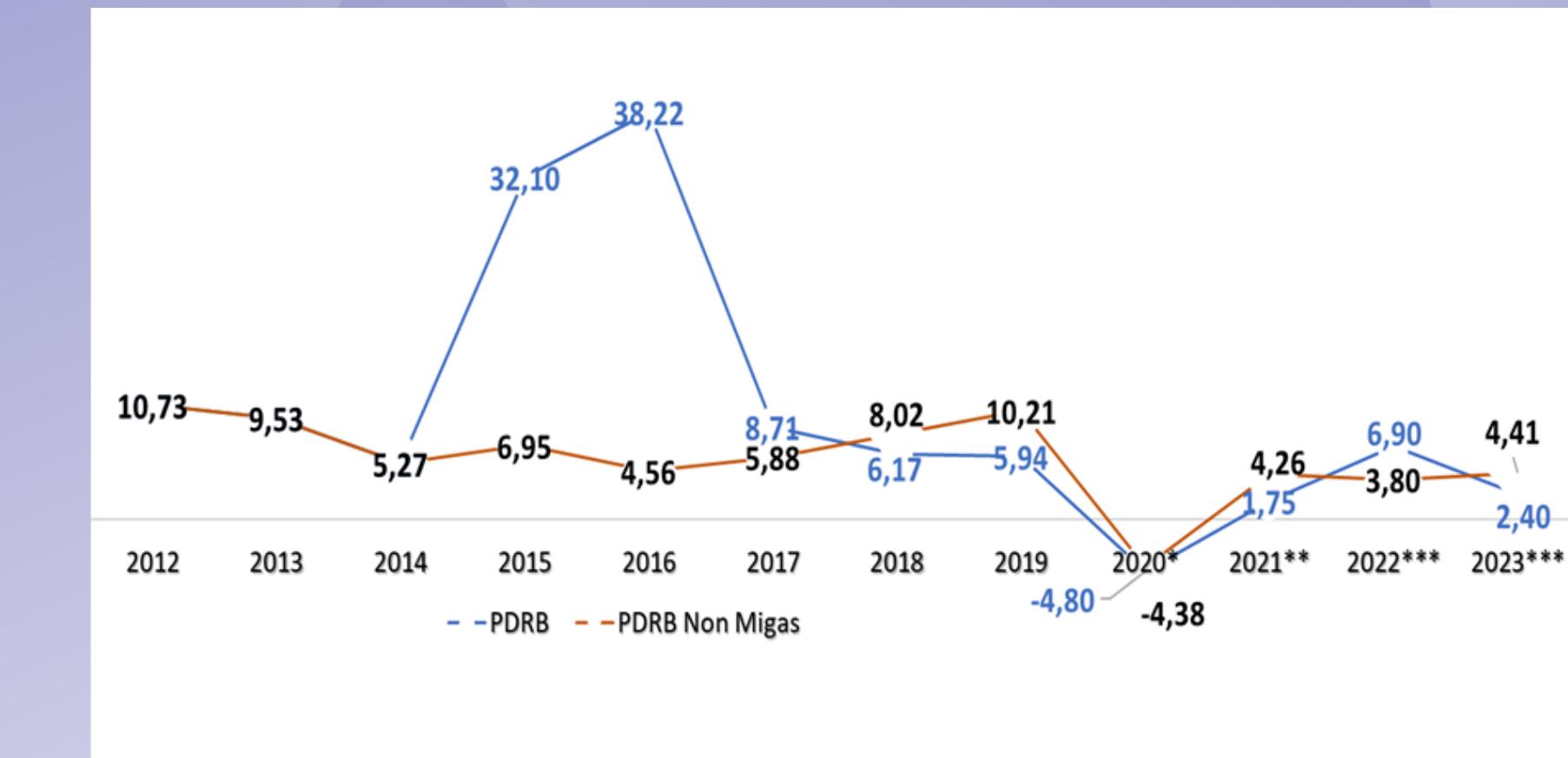
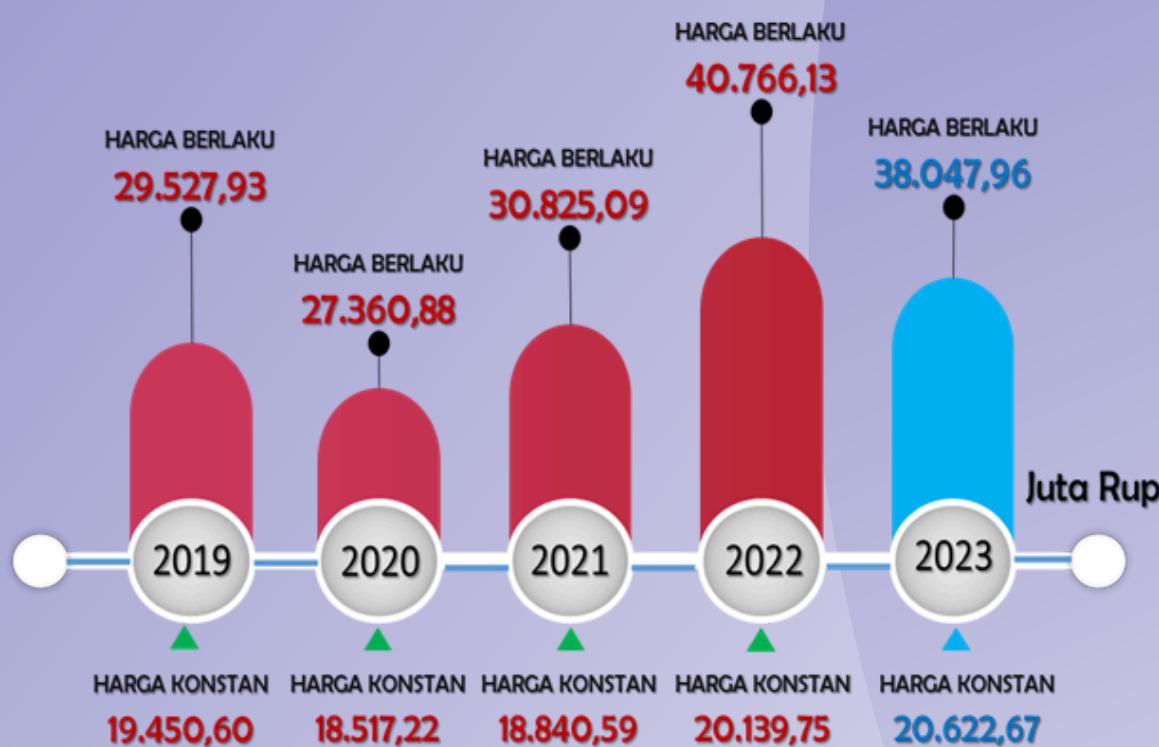


Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA



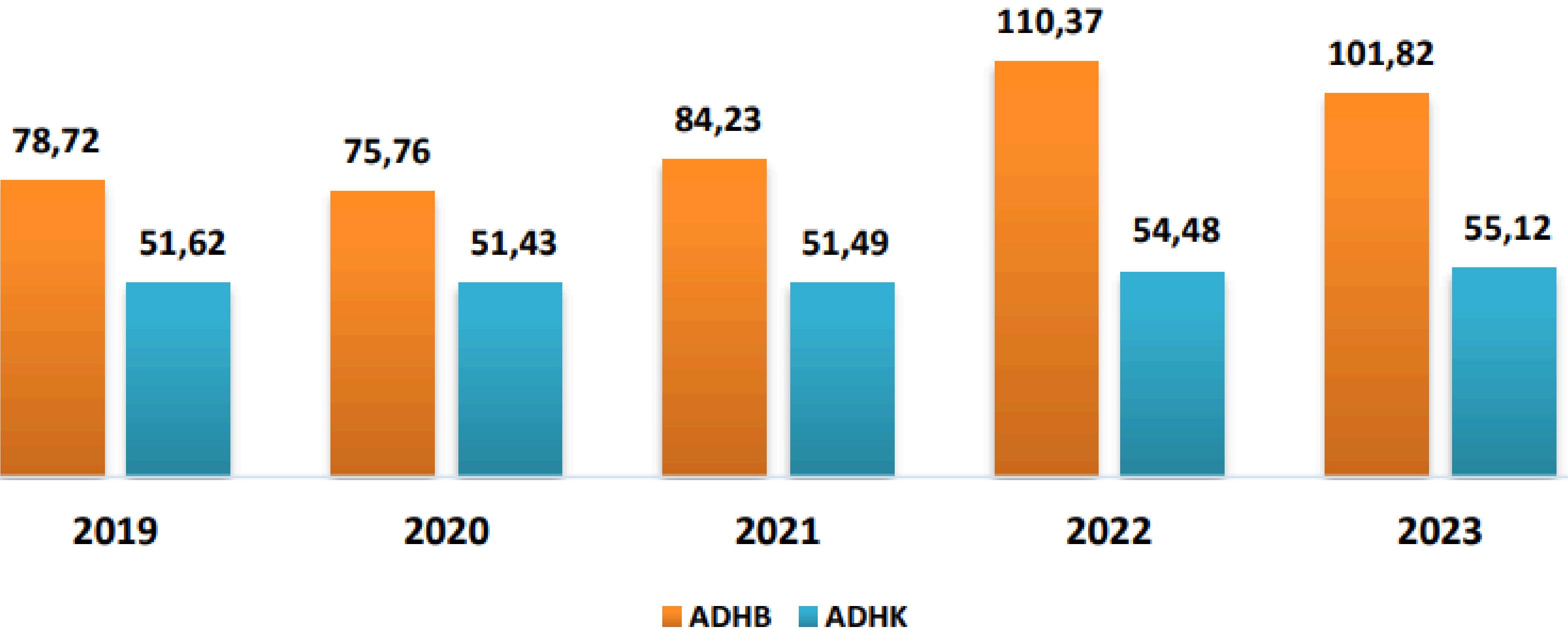


PERTUMBUHAN EKONOMI



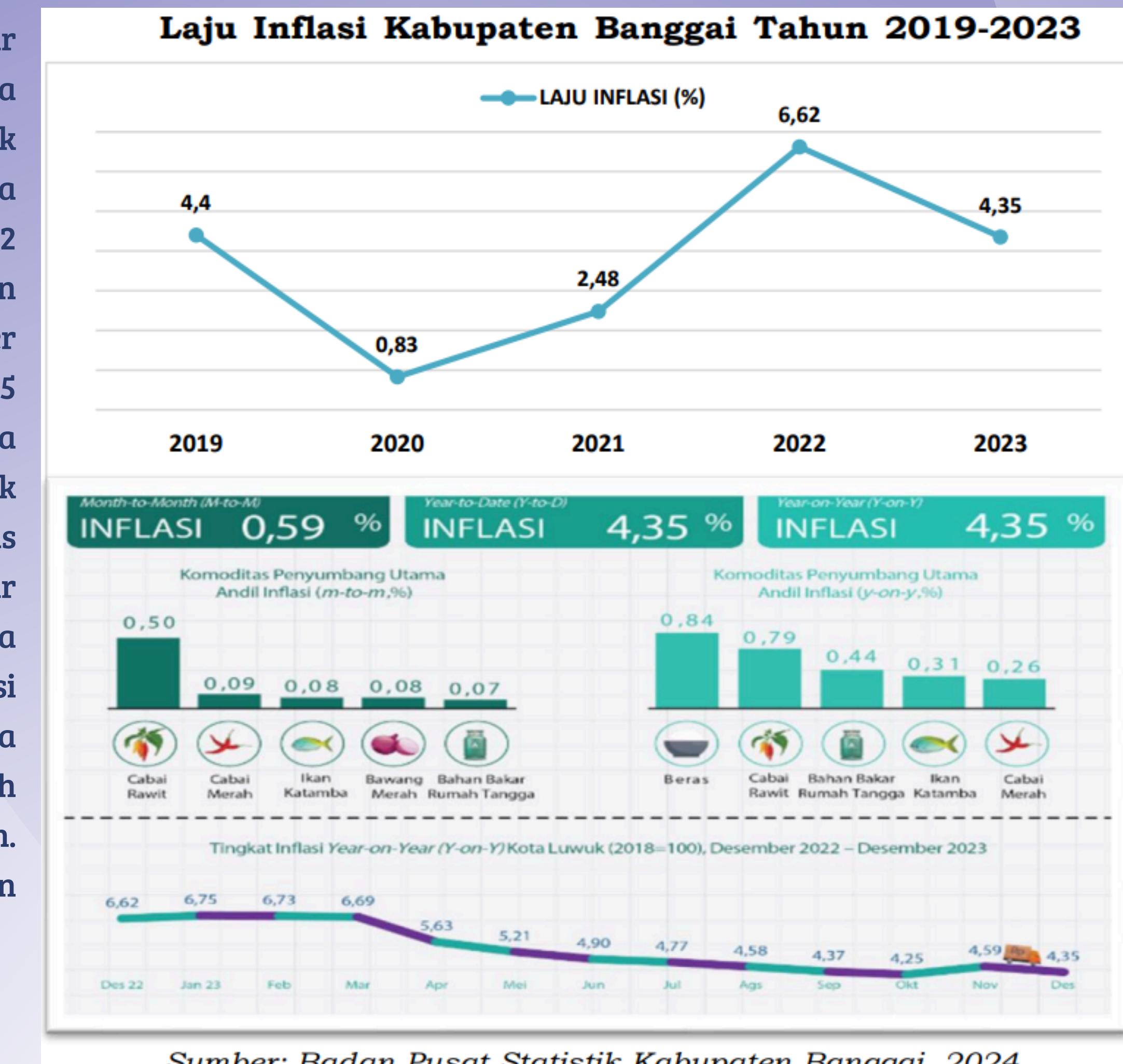
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai

Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2024

Tingkat inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada bulan Desember 2023 Inflasi kota Luwuk adalah sebesar 4,35 persen, sementara inflasi tahun kalender dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 persen dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 persen. Komoditas Penyumbang Utama Andil Inflasi (Year On Year) Kota Luwuk pada bulan Desember 2023 yaitu Beras (0,84%), Cabai Rawit (0,79%), Bahan Bakar Rumah Tangga (0,44%), Ikan Katamba (0,31%), Cabai Merah (0,26%). Inflasi tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Sumenep sebesar 5,08 persen dan terendah di Kota Bandung sebesar 0,63 persen. Sedangkan Kota Luwuk berada diurutan ke-4 inflasi tertinggi di Indonesia.





PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

DINAS PETERNAKAN



PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN (BANSOS BARANG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT) TAHUN 2021

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ternak DOC Ayam Pedaging
45.000 Ekor, 45 Kelompok, | Rp. 625.500.000,00; |
| 2. Peralatan Kandang Ayam Pedaging
900 Set (Tempat pakan & minum), 45 Kelompok, Rp. 175.500.000,00; | |
| 3. Perlengkapan Kandang Ayam Pedaging
900 Set (Lampu, kabel, pitting, stekker), 45 Kelompok, Rp. 62.010.000,00; | |
| 4. Pakan Ternak Ayam Pedaging
992.597 Kg, 45 Kelompok, | Rp. 1.866.600.000,00; |

PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN (BANSOS BARANG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT) TAHUN 2022

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ternak Ayam Petelur
5.000 Ekor, 25 Kelompok, | Rp. 512.000.000,00; |
| 2. Pakan Ternak Ayam Petelur
49.500 Kg , 25 Kelompok, | Rp. 742.500.000,00; |

PERENCANAAN 2023

Bansos Uang pada 45 Kelompok (450 KK) di Kec. Bualemo, Balantak Utara, Balantak, Balantak selatan, Mantoh, Masama dan Lamala sebesar Rp.1.724.850.000,00



PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT





PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

DINAS PERIKANAN



Tahun 2021

- Jumlah penerima = 15 Kelompok dengan total pembudidaya ikan = 173 orang
- Jumlah Benih Lele = 29.756 Ekor
- Jumlah Pakan ukuran 1 mm = 173 Kg, Ukuran 3 mm = 1557 Kg.
- Sarpras 173 Unit
- Hasil Panen Pertama Rata – Rata 25 – 30 Kg. Sebagian di konsumsi dan Sebagian di pasarkan.
- Realisasi Anggaran Rp. 170.000.000

Tahun 2022

- Jumlah penerima = 22 Kelompok dengan total pembudidaya ikan = 250 orang
- Jumlah Benih Lele = 124.996 Ekor
- Jumlah Pakan ukuran 1 mm = 250 Kg, Ukuran 3 mm = 3.259 Kg.
- Sarpras 173 Unit.

Tahun 2023

- Jumlah penerima = 200 orang
- Jumlah Benih lele 200.000 ekor
- Jumlah Pakan ukuran 1 mm 3.000 kg, Ukuran 3 mm = 30.000 kg
- Sapras 200 unit
- Anggaran Rp. 2.000.000.000,-

Bidang Infrastruktur & Lingkungan Hidup BAPPEDA



Kebijakan Pengembangan Air Minum 2020-2024	Strategi Pengembangan Air Minum 2020-2024	Arahan Lokasi	Acuan Peraturan
<p>Target 100% air minum dan 85% akses air minum layak tahun 2020-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teridentifikasi penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Banggai - Teridentifikasi kebutuhan penyelenggaraan SPAM (unit air baku, produksi, distribusi, cakupan pelayanan dan pelayanan) di Kabupaten Banggai - Tersusunnya strategi dan program penyelenggaraan SPAM (pola investasi dan pembiayaan, dan tahapan pembangunan SPAM) di Kabupaten Banggai 	<p>Wilayah pelaksanaan dilaksanakan di Kabupaten Banggai yang meliputi 23 kecamatan dengan 46 kelurahan dan 291 desa</p>	Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2021	

NO	USULAN KEBUTUHAN	SATUAN/KAPASITAS TERPASANG	RENCANA KEBUTUHAN				
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SPAM Regional						
	1.Wilayah Kota Luwuk	492 L/det	64,20	66,20	68,24	70,20	72,39
	2. Wilayah Luwuk Selatan		30,85	31,94	33,05	34,17	35,31
	3. Wilayah Luwuk Utara		30,22	30,84	31,47	32,11	32,75
2	SPAM Non Regional						
	1.Wilayah	L/det					
	2.Kecamatan Kintom	20L/det					
	3.Desa	L/det					
3	SPAM Kawasan Khusus						
	1.Kawasan Luwuk Utara	L/det					
	2.Kawasan Luwuk Selatan	L/det					

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM				
			Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
1	SPAM Jaringan Perpipaan						
	Kapasitas Terpasang	492 L/det					
	Kapasitas Produksi	86,30 L/det					
	Idle Capacity	35,70 L/det					
	Kebocoran	29 %					
	Cakupan Pelayanan Penduduk	189.215 SR					
2	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan						
	Cakupan Pelayanan Penduduk	60,25 %					

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan perencanaan dan pengendalian program infrastruktur permukiman, perlu adanya Tim Penyusun Dokumen SPKP sebagai upaya mewujudkan visi mewujudkan Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024. Kawasan permukiman merupakan hasil dari pencitraan dalam pengembangan kebijakan permukiman kabupaten/kota dalam pemenuhan infrastruktur, maka pemerintah turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat, baik dalam penyusunan program, pengendalian, pemantauan, evaluasi maupun pembiayaan

**Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Rumah tangga pengguna air bersih (%)	85,819	85,874	71	90,76	76,08
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	66,57	72,75	70	80,492	72,87
3.	Rasio Rumah Tangga Bersanitasi (%)	66,64	74,060	65	74,23	92,97
4.	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk	N/A	2,59	3,17	3,13	3,12
5.	Lingkungan Permukiman kumuh	78,81	78,72	78,81	78,81	70,33
6.	Rasio rumah layak huni	N/A	N/A	85	85	72,99
7.	Rasio Permukiman layak huni	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982
8.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	N/A	85,69	N/A	N/A	N/A
9.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	N/A	85,69	N/A	N/A	N/A
10.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.051	0.051	0.051	0,068	0,045
11.	Proporsi rumah tanga kumuh perkotaan	0.049	0.049	0.049	N/A	0,078

**Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	4,35	4,35	4,35	4,35	6,25
a	Jumlah KIM	1	1	1	1	15
b	Jumlah Kecamatan	23	23	23	23	24
2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	70,23	76,65	85,20	88,30	N/A
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	42,43	45,78	67,5	70,21	N/A

Sumber : DKISP Kabupaten Banggai, 2024

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024



MENGATASI MASALAH AIR BERSIH

JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS AIR MINUM YANG AMAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 & 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK		AKSES AIR MINUM LAYAK SENDIRI	
		2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	MANTOH	2.829	2.716	1.890	2.675
2	BATUI	5.065	4.952	3.549	4.708
3	BUALEMO	5.918	5.705	5.609	4.927
4	LUWUK TIMUR	3.655	3.552	2.874	2.733
5	MASAMA	3.628	3.515	2.034	3.393
6	BUNTA	6.436	6.323	5.251	5.500
7	PAGIMANA	7.093	6.980	4.544	6.296
8	LUWUK	10.411	10.298	9.550	9.709
9	LUWUK SELATAN	5.483	5.370	4.523	4.855
10	NUHON	5.684	5.571	4.993	5.352
11	MOILONG	5.932	5.819	4.599	5.258
12	KINTOM	3.409	3.286	2.436	2.595
13	NAMBO	2.668	2.555	1.395	2.254
14	TOILI	10.738	10.625	9.576	9.735
15	TOILI BARAT	7.143	7.030	6.325	6.884
16	BATUI SELATAN	4.075	3.962	3.384	3.543
17	LAMALA	2.275	2.162	1.452	2.611
18	LUWUK UTARA	5.068	4.952	2.933	3.192
19	SIMPANG RAYA	4.310	4.197	2.929	3.162
20	LOBU	1.226	1.113	467	926
21	BALANTAK SELATAN	1.858	1.745	1.679	1.397
22	BALANTAK	1.908	1.795	1.193	1.352
23	BALANTAK UTARA	1.541	1.428	962	1.121
JUMLAH (KAB/KOTA)		108.353	105.651	84.147	94.178

Sumber: DINAS PUPR BIDANG AIR MINUM, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN

Keterangan : PERSENTASE TERLAYANI DI TAHUN 2022 (77.66 %) DAN TAHUN 2023 (89.14 %)

PROSES PELAKSANAAN SELEKSI CALON PENDAMPING KECAMATAN



Pendamping kecamatan atau pendamping desa memiliki tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

- Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
- Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana desa
- Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs desa
- Mentoring pendamping lokal desa dan KPMD

Pendampingan desa dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pihak ketiga.



PROSES PELAKSANAAN SELEKSI CALON PENDAMPING KECAMATAN



PRESTASI BAPPEDA SELAMA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR



- ❖ JUARA III PANGRIPTA PROP. SULAWESI TENGAH TAHUN 2017
- ❖ JUARA I PANGRIPTA PROP. SULAWESI TENGAH TAHUN 2018
- ❖ 14 BESAR NASIONAL PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2018
- ❖ JUARA II PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SULAWESI TENGAH TAHUN 2019
- ❖ JUARA II PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SULAWESI TENGAH TAHUN 2020
- ❖ JUARA I PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SULAWESI TENGAH TAHUN 2021
- ❖ JUARA II NASIONAL PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
- ❖ 10 BESAR NASIONAL PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
- ❖ JUARA III PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
- ❖ JUARA I INDONESIA'S SDGS ACTION AWARD TAHUN 2024 KATEGORI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) AISYIYAH KABUPATEN BANGGAI
- ❖ PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK KE-II TINGKAT PROVINSI SULTENG TAHUN 2024
- ❖ 10 BESAR NASIONAL PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024



PENGHARGAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



THANK
YOU

